

PERAN KEJAKSAAN DALAM PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA
KORUPSI DI KABUPATEN TAKALAR
(TAHUN 2014-2016)



Skripsi
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Hukum Jurusan Ilmu Hukum
Pada Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar

Oleh:
ABRAR LAFI NAIM

NIM : 10400114095

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Abrar lafi Naim
NIM : 10400114095
Tempat/Tgl Lahir : Ujung Pandang, 24 Maret 1997
Jur/Prodi/Konsentrasi : Ilmu Hukum/S1/Hukum Pidana
Fakultas : Syariah dan Hukum
Alamat : Jl. H. Pajonga Dg.Ngalle No.30, Kabupaten Takalar.
Judul : Peran Kejaksaan Dalam Penyidikan dan Penuntutan
Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Takalar (Tahun
2014-2016)

Dengan penuh kerendahan hati dan kesadaran, penulis yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata, 15 Mei 2018.

Penulis,

ABRAR LAFI NAIM

NIM : 10400114095

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Peran Kejaksaan Dalam Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Takalar" yang disusun oleh saudara Abrar Lafi Naim, NIM:10400114095, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum dan dipertahankan dalam sidang Munaqasah yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 15 Mei 2018, bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1439 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan beberapa perbaikan.

Samata, 23 Mei 2018 M

8 Ramadhan 1439 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
Sekertaris : Dr. H. Abd. Halim Talli M.Ag
Munaqisy I : Rahman Syamsuddin, S.H, M.H
Munaqisy II : Ahkam Jayadi, S.H, M.H
Pembimbing I : Dr. Hamsir, M.Hum
Pembimbing II : Dr. Hj.Patimah, M.Ag

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum,
UIN Alauddin Makassar

Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag

NIP. 19621016 19903 1 003

KATA PENGANTAR

Tiada yang paling mulia diucapkan selain puji dan syukur kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis selalu semangat dalam menyelesaikan karya ilmiah penyusunan skripsi ini yang berjudul ***Peran Kejaksaan Dalam Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Takalar (Tahun 2014-2016)***

Shalawat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga yang tercinta dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau.

Adapun maksud dari penyusunan tugas akhir ini yaitu untuk memenuhi salah satu syarat yang telah ditentukan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar. Dalam penyusunan berdasarkan pada ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh selama ini, khususnya dalam pendidikan di UIN Alauddin Makassar serta hasil penelitian penulis di Kantor Kejaksaan Negeri Takalar.

Penulisan skripsi ini tidak akan pernah berhasil tanpa doa dan dukungan dari segenap keluarga besar penulis, terkhusus kepada kedua orang tua penulis, yaitu Bapak H.Muh Natsir Rahman, S.Sos, M.M dan Ibu Hj. St Nurhaena, S.Sos dan Adik-adik serta Agustina Said tercinta, penulis ucapkan banyak terima kasih. Selain itu penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan kepada Bapak Dr. Hamsir, M.Hum selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Hj. Patimah, M.Ag selaku pembimbing II yang telah dengan sabar, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran memberikan bimbingan, motivasi,

arahan, dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama menyusun skripsi.

Selanjutnya ucapan terima kasih penulis sampaikan pula kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Prof. Musafir Pababbari, M.Si
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) Prof. Darussalam Syamsuddin M.Ag
3. Ketua Jurusan Istiqamah, S.H., M.H dan Sekretaris Jurusan Rahman Syamsuddin, S.H., M.H.
4. Penguji Rahman Syamsuddin, S.H, M.H dan Ahkam Jayadi, S.H, M.H
5. Penasehat Akademik (PA) penulis, Dr. Munir Salim, S.H., M.H.
6. Pembimbing Praktek Pengenalan Lapangan (PPL), Dr. Irfan, S.Ag, M.Ag
7. Bapak/ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar
8. Bapak/ibu Pegawai Tata usaha Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar
9. Teman-teman terbaik saya yang tidak bisa saya sebut satu persatu, Ilmu Hukum B, dan kakanda serta Mantan Pengurus HIPERMATA Kom.UINAM
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan, sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Samata, 15 Mei 2018

Penulis

ABRAR LAFI NAIM

NIM. 10400114095

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian dan Diskripsi Fokus	5
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN TEORITIS	11
A. Tindak Pidana Korupsi	11
1. Pengertian Umum Tindak Pidana Korupsi	11
2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi Menurut Peraturan Perundang-Undangan	14
3. Faktor-faktor Penyebab Tindak Pidana Korupsi	16
B. Kejaksaan	21
1. Sejarah Kejaksaan	21
2. Kedudukan Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan	

Republik Indonesia	25
3. Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia	36
C. Kajian Pustaka	57
BAB III METODE PENELITIAN	61
A. Lokasi dan Jenis Penelitian	61
B. Pendekatan Penelitian	61
C. Sumber Data	62
D. Metode Pengumpulan Data	62
E. Instrumen Penelitian	63
F. Teknik Pengolahan dan Pengumpulan Data	64
BAB IV Landasan Hukum dan Efektivitas Kejaksaan Negeri Takalar	
Dalam Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi	66
A. Aturan Hukum Tentang Peran Kejaksaan Dalam	
Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi.....	66
B. Optimalisasi Peran Kejaksaan Negeri Takalar	
Dalam Penyidikan dan penuntutan Tindak Pidana Korupsi	68
C. Analisis	85
BAB V PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Implikasi Penelitian	92
C. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	100

PEDOMAN TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak di jumpai nama dan istilah teknis (technical term) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
س	s\ a	s\	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ط	h} a	h}	ha (dengan titik di bawah)
ك	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ز	z\ al	z\	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
	syin	sy	es dan ye
	s} ad	s}	es (dengan titik di bawah)
	d} ad	d}	de (dengan titik di bawah)
	t} a	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z} a	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	„ain	‘	apostrof terbalik
ف	Fa	f	Ef

ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
هـ	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (").

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

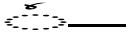
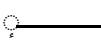
Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fath}ah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>d}ammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fath}ah dan ya	ai	a dan i
	fath}ah dan wau	au	a dan u

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan	Nama	Huruf dan	Nama
... ʾ ...	<i>fath}ah</i> dan <i>alif</i>	a>	a dan garis di atas
	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	i>	i dan garis di atas
	<i>d}ammah</i> dan <i>wau</i>	u>	u dan garis di atas

4. Ta marbu>t}ah

Transliterasi untuk *ta marbu>t}ah* ada dua, yaitu: *ta marbu>t}ah* yang hidup atau mendapat harkat *fath}ah*, *kasrah*, dan *d}ammah*, transliterasinya adalah [t].

Sedangkan *ta marbu>t}ah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbu>t}ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbu>t}ah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

5. *Syaddah (Tasydi>d)*

Syaddah atau *tasydi>d* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydi>d* (ﺩ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ﺍ (*alif lam ma,,arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'a>n*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

9. *Lafz} al-Jala>lah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mud}a>f ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.


10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak

pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

DAFTAR SINGKATAN

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:



swt.	= subh}a>nahu> wa ta,,a>la>
saw.	= s}allalla>hu ,,alaihi wa sallam
a.s.	= ,,alaihi al-sala>m
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
Q.S. ...(...): 4	= Quran, Surah ..., ayat 4

ABSTRAK

Nama : ABRAR LAFI NAIM
 NIM : 10400114095
 Fak/Jurusan : Syari'ah & Hukum / Ilmu Hukum
 Judul : Peran Kejaksaan Dalam Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Takalar (Tahun 2014-2016)

Skripsi ini membahas tentang “Peran Kejaksaan Dalam Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Takalar (Tahun 2014-2016)”, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aturan hukum tentang peran lembaga kejaksaan dalam pemeriksaan tindak pidana korupsi dan mengetahui efektifitas lembaga kejaksaan negeri takalar dalam pemeriksaan tindak pidana korupsi.

Penelitian ini menggunakan metode *field research* atau penelitian lapangan. Adapun sumber data yang digunakan adalah data-data primer dan sekunder dari *press release* atau pihak-pihak yang terkait sehubungan dengan penelitian ini, serta data laporan dugaan yang disajikan oleh bidang pidana khusus Kejari Takalar terkait tindak pidana korupsi.

Adapun hasil penelitian diketahui bahwa pengaturan mengenai tugas dan kewenangan Kejaksaan RI khususnya sebagai penyidik secara normatif dapat dilihat dalam ketentuan Undang-Undang mengenai Kejaksaan, yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 30 ayat 1 huruf (d) yang berbunyi “melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-undang”. Dan mengenai efektifitas kinerja jaksa penyidik hingga jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Takalar telah dijalankan sesuai dengan tugas dan kewenangannya, dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis, kendala yang paling berpengaruh dalam penyidikan ialah mengenai anggaran dalam setiap perkara yang tidak cukup untuk menangani kasus yang lain nya dan juga ditemui pada saat melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Takalar adalah kendala teknis. Kendala teknis itu yang mana adalah perhitungan auditor dari BPK/BPKP. Pihak dari Kejaksaan Negeri Takalar meminta bantuan dari BPK/BPKP untuk penghitungan kerugian uang negara, Penghitungan auditor ini menjadi kendala dalam tahap penyidikan perkara tindak pidana korupsi yang mana seringkali ditemui dari pihak BPK/BPKP meminta tambahan data untuk melengkapi rincian keuangan, serta menjadi kendala lain di pihak auditor ialah lambatnya prosesnya auditor yang disebabkan banyaknya permintaan dari daerah lain se-sulawesi selatan yang juga ingin mengaudit keuangan demi proses penegakan hukum di wilayah hukum masing-masing. kendala lain yakni terbatasnya jumlah personil Penyidik dan Belum Memadainya Sarana & Prasarana untuk menunjang kinerja Penyidik di Kejaksaan Negeri Takalar khususnya dibidang Tindak Pidana Khusus (PIDSUS).

Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Kendala Penyidikan, Kejaksaan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini telah Dinyatakan dengan tegas dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa “Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum “(rechstaat)”, tidak berdasar atas kekuasaan belaka (machstaat).¹ Jadi jelas bahwa cita-cita Negara hukum (rule of law) yang terkandung dalam UUD 1945 bukanlah sekedar Negara yang berlandaskan sembarang hukum. Hukum yang didambakan bukanlah hukum yang ditetapkan semata-mata atas dasar kekuasaan, yang dapat menuju atau mencerminkan kekuasaan mutlak atau otoriter. Hukum yang demikian bukanlah hukum yang adil (just law), yang didasarkan pada keadilan bagi rakyat.

. Aparat penegak hukum khususnya JAKSA dalam mengemban tugas yang luas, kompleks dan rumit. Mereka pun mempunyai posisi penting. Sebagai penegak hukum. Kewenangan kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi masih saja dipersoalkan, walaupun Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa wewenang jaksa dalam menyidik dan menuntut tindak pidana khusus (korupsi) tidak melanggar UUD 1945. Alasannya, konstitusi tidak melarang adanya fungsi ganda yang dijalankan jaksa itu, seperti presiden memiliki

¹ Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945.

fungsi sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dan pembentuk undang-undang.

Atas dasar itu, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pengujian pasal 30 ayat (1) huruf d UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, pasal 39 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor, dan Pasal 44 ayat (4),(5), Pasal 50 ayat (1),(2),(3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK terkait kewenangan Jaksa menyidik tindak pidana korupsi.

Untuk itu perlu pengkajian secara juridis normatif tentang kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, eksistensi dari pasal 30 ayat (1) huruf d undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I yaitu mengenai kewenangan Kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana tertentu yaitu tindak pidana korupsi.

Dalam KUHAP, kewenangan penyidikan jatuh ketangan Kepolisian Republik Indonesia. Pasal 6 KUHAP menyebutkan penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, ini berarti bahwa kepolisian adalah penyidik tunggal didalam KUHAP. Akan tetapi dalam aturan peralihan pasal 284 ayat (2) KUHAP menyebutkan dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau di nyatakan tidak berlaku lagi.

Dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ketentuan khusus adalah ketentuan yang menyangkut pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi (Undang-undang Nomor 7 Drt tahun 1955 dan Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

Bagaimana agar tidak menimbulkan keragaman penafsiran dalam peraturan pemerintah Nomor 27 tahun 1983 dalam pasal 17 secara tegas menyebutkan Kejaksaan sebagai penyidik untuk tindak pidana tertentu (korupsi). Untuk lebih lengkapnya pasal tersebut adalah sebagai berikut : “Penyidik menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh Penyidik, Jaksa dan Pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.”²

Pasal inilah yang menjadi acuan untuk memberikan kewenangan Kejaksaan bertindak selaku penyidik tindak pidana korupsi. Dalam pasal tersebut sebenarnya ada pembatasan yaitu dengan adanya redaksi kata “sementara”. Kenyataannya setelah sekian banyak ketentuan mengenai undang-undang tindak pidana korupsi mulai dari Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tidak ada penyebutan secara tegas tentang apakah Kejaksaan memiliki kewenangan untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dengan adanya redaksi kata “sementara” itu timbullah berbagai macam penafsiran apakah Kejaksaan memiliki kewenangan dalam penyidikan tindak

²**Sahuri Lasmadi.**Dosen S1,S2,S3 Fakultas Hukum Universitas Jambi.

pidana korupsi. Untuk menjawab persoalan ini, maka perlu dilakukan pengkajian secara juridis normatif, artinya akan dilihat apakah memang dalam ketentuan perundang-undangan yang ada mengatur tentang kewenangan kejaksaan dalam peyidikan tindak pidana korupsi.

Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 jo Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka baik hakim, jaksa dan polisi diatur secara terpisah dan mandiri, yang tentunya berdampak pada pelaksanaan penegakan hukum, yaitu terjadiya tumpak tindih tugas,kewenangan dan tanggung jawab polisi,jaksa dan hakim, bahkan terdapat kesan koordinasi fungsional dalam sistem peradilan pidana terpadu (*Integrated Judiciary System*) tidak berjalan sebagaimana yang di harapkan.³

Sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) sebagai suatu sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi masalah di maknai sebagai upaya untuk mengendalikan atau membatasi kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Komponen-komponenyang bekerja dalam sistem ini meliputi Kepolisian,Kejaksaan,Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Empat

³Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia, Mahkamah Agung RI: tanpa tahun: hal.39.

komponen ini di harapkan dapat bekerjasama sehingga menghasilkan suatu keterpaduan yang kita kenal dengan *integrated criminal justice system*.

Masing-masing komponen secara administratif berdiri sendiri, mempunyai tugas dan fungsi tersendiri sesuai dengan kewenangan dan pengaturan yang dimilikinya. Setiap masalah dalam subsistem satu dengan yang lainnya adalah saling berhubungan dan setiap masalah dalam salah satu subsistem akan menimbulkan dampak pada subsistem lainnya⁴. Sehingga pada kesempatan ini penulis ingin meneliti proses pemeriksaan hingga penuntutan tindak pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Takalar (Tahun 2014-2016).

B. Fokus Penelitian dan deskripsi fokus

1. Peran Kejaksaan Republik Indonesia

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Penuntutan merupakan tindakan Jaksa untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang- undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang Pengadilan. Pelaku pelanggaran pidana yang akan dituntut adalah yang benar bersalah dan telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana yang disangkakan dengan didukung oleh barang bukti yang cukup dan didukung oleh minimal 2 (dua) orang saksi.

⁴Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6, Nomor 2, Oktober 2015. hal 15.

Keberadaan Kejaksaan Republik Indonesia diatur dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Berdasarkan undang-undang tersebut, kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Adapun yang menjadi tugas dan wewenang Kejaksaan bidang Pidana, yaitu:

- 1) melakukan penuntutan;
- 2) melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 3) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- 4) melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- 5) melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

2. Penyidikan

Dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwasanya penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Dari ketentuan tersebut, maka hukum acara yang berlaku bagi tindak pidana korupsi ialah Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, sehingga dalam pembahasan mengenai proses yang dimaksud yakni acara tindak pidana korupsi itu menggunakan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang tindak pidana korupsi.

Dalam pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut disebutkan pengertian penyidikan yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Dalam Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa yang dimaksudkan dengan penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidikan tidak

terlepas dengan proses penyelidikan yang menurut pasal 1 angka 5 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Antara penyelidikan dan penyidikan adalah dua fase yang satu antar keduanya itu saling berkaitan dan saling mengisi guna dapat diselesaikan pemeriksaan suatu peristiwa pidana. Namun demikian ditinjau dari beberapa segi terdapat perbedaan antara kedua tindakan tersebut, yaitu dari segi pejabat pelaksanaannya, pejabat penyidik terdiri dari semua anggota Polri dan pada dasarnya pangkat dan kewenangannya berada dibawah pengawasan penyidik. Wewenangnyapun sangat terbatas hanya meliputi penyelidikan atau mencari dan menemukan data atas suatu tindakan yang diduga merupakan tindak pidana, hanya dalam hal-hal telah mendapat perintah dari pejabat penyidik, barulah penyidik melakukan tindakan yang disebutkan dalam pasal 5 ayat (1) huruf b, yaitu penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seorang, membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

3. Penuntutan

Penuntutan diatur dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 yang menyebutkan bahwa penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara tindak pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam

hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 6 dari Undang-Undang Hukum Acara Pidana, membedakan antara Jaksa dengan Penuntut Umum. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sedangkan penuntut umum adalah jaksa yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Aturan Hukum Tentang Peran Kejaksaan Dalam Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi ?
2. Sejauh mana Efektifitas Kejaksaan Negeri Takalar Dalam Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk Mengetahui Aturan Hukum Tentang Peran Kejaksaan Dalam Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi.

2. Untuk Mengetahui Efektifitas Kejaksaan Negeri Takalar Dalam Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi.

E. Manfaat Penelitian

1. Menambah pengetahuan dan pengalaman pada penulisan dalam penelitian hukum.
2. Sebagai tolak ukur dalam mengevaluasi peranan kejaksaan sebagai penegak hukum dalam proses pemeriksaan mulai dari penetapan status tersangka hingga terpidana tindak pidana korupsi dan menjadi sumbangan pemikiran bagi pihak kejaksaan dan masyarakat dalam upaya memelihara dan menumbuhkan sikap yang baik terhadap proses tersebut dalam tindak pidana khusus (korupsi).
3. Untuk menambah bahan referensi bagi Mahasiswa Fakultas Syaria'ah & Hukum, serta Jurusan Pidana pada khususnya.
4. Sebagai bahan masukan Mahasiswa selanjutnya yang akan melakukan penyempurnaan dengan mengadakan penelitian yang serupa.
5. Untuk memenuhi persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah & Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Umum Tindak Pidana Korupsi

Dilihat dari asal katanya, tindak pidana korupsi⁵ dalam bahasa latin disebut *corruptio* atau *carruptus*. Menurut *Webster Student Dictionary*, korupsi digambarkan dengan menggunakan istilah “*corruptus*”.⁶ Andi Hamzah menyatakan bahwa korupsi berasal dari bahasa latin yaitu “*corrupti*” atau “*corruptu*” yang kemudian muncul dalam banyak bahasa eropa seperti inggris dan perancis yaitu “*corruption*”, dalam bahasa belanda “*korruptie*” yang selanjutnya muncul pula dalam perbendaharaan bahasa indonesia : korupsi, yang dapat berarti suka disuap.⁷

Pengertian tindak pidana korupsi menurut Ensiklopedia Indonesia: Korupsi (Berasal dari bahasa latin, *Corruption* sama dengan penyuapan; dari *corrumpere* sama dengan merusak). Gejala dimana para pejabat badan-badan negara

⁵Tindak pidana korupsi berdasarkan pemahaman pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah di ubah oleh undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , tindak pidana korupsi merupakan tindakan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.

⁶<http://www.wordcentral.com/cgi-bin/student?book=student&va=corrupt> di akses terakhir pada tanggal 10 september 2017 pada pukul 15:27.

⁷Andi Hamzah, Delik-delik Terbesar Di Luar KUHP dengan Komentar, Jakarta , Pradnya Paramita, 1995, hlm.135.

menyalahgunakan jabatan mereka, sehingga memungkinkan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta berbagai ketidakberesan lainnya.⁸

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian tentang “korupsi” sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.⁹

Dalam berbagai literatur, disebutkan pula bahwa *corruptio* itu berasal dari kata asal *corrumpiere* atau *corrupteia* suatu kata latin yang lebih lebih berarti penyuapan atau “*seduction*”. Oleh karenanya, tindak pidana korupsi sering pula di artikan sebagai perbuatan memberika, menyerahkan kepada seseorang agar orang tadi berbuat untuk atau guna keuntungan (dari pemberi).¹⁰

Adapun yang di artikan sebagai “*seduction*” atau penggoda sesuatu yang menarik untuk membuat seseorang penyelewengkan dan dipakai juga untuk menunjukkan keadaan dan perbuatan yang busuk.¹¹ Hal serupa dikemukakan oleh Hermien Hadiati Koeswadi dalam bukunya yang berjudul korupsi di Indonesia dari delik jabatan ke Tindak Pidana Korupsi, korupsi juga berasal dari kata “*corrupteia*” yang berarti “*bribery*” yang berarti memberikan atau menyerahkan kepada seseorang agar orang tadi berbuat untuk keuntungan

⁸Hassan Shadily, Ensiklopedia Indonesia, Ihtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta, 1983, hlm.1876.

⁹Wojo Wasito, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jogjakarta, 2001, hlm.597.

¹⁰Fockema Andrea, Kamus Hukum, Bina cipta:Bandung,1983,hlm.45.

¹¹Ibid.

pemberi, atau juga berarti *seduction* yang berarti sesuatu yang menarik untuk seseorang berbuat menyeleweng.¹²

Dari bahasa latin itulah, korupsi (*corrumpiere*) diterjemahkan ke banyak bahasa di Eropa seperti Inggris: *corruption* atau *corrupt*, Perancis: *corruption*, dan Belanda: *corruptive*.¹³ Hal ini yang kemudian diadopsi pula ke dalam bahasa Indonesia “*korupsi*. Adapun dalam bahasa sanskerta (sebagaimana tertuang dalam Naskah Kuno Negara Kertagama), arti harfiah *corrupt* menunjukkan kepada perbuatan yang rusak, busuk, bejad, tidak jujur yang disangkut pautkan dengan keuangan.¹⁴

Robert Klitgaard memberikan rumusan dengan model matematis yaitu $(C=M+D-A)$ jadi *Corruption = Monopoly Power + Discretion by Official – Accountability*,¹⁵ sehingga tindak pidana korupsi terjadi karena adanya monopoli atas kekuasaan dan diskresi (hak untuk melakukan penyimpangan pada suatu kebijakan), tetapi dalam kondisi tidak adanya akuntabilitas.¹⁶

¹²**Hermien Hadiati Koeswadji**, Korupsi di Indonesia dari Delik Jabatan ke Tindak Pidana Korupsi, Citra Aditya Bakti: Bandung, 1994, hlm. 32.

¹³**Andi Hamzah**, Op.Cit., hlm 3

¹⁴**Sudarto**, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni Bandung, Cetakan keempat, 1996, hlm. 115. Dalam hal ini, penulis menambahkan bahwa istilah korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* dari kata kerja *corrumpere* yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok. Menurut *Transparency International*, tindak pidana korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.

¹⁵**Rohim**, Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi, Depok, Pena Multi Media, 2008, hlm. 2.

¹⁶*Ibid.*

Komisi Pemberantasan Korupsi merilis bahwa tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang diperhitungkan. Perhitungan yang dimaksud adalah perhitungan secara ekonomis dengan membandingkan hasil korupsi dan biaya yang dikeluarkan. Perhitungan ekonomis inilah yang menjadi faktor pemicu terus meningkatnya tindak pidana korupsi dari waktu ke waktu. Singkatnya, apabila sisa hasil korupsi RP-Z ternyata jauh lebih besar dari RP-Y, maka tidak akan ada efek jera bagi para pelaku tindak pidana korupsi meskipun telah dihukum dengan pidana penjara atau denda. Hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan cukup untuk hidup beberapa turunan setelah mereka selesai menjalani masa tahanan. Hal ini membuat para pelaku tindak pidana korupsi tidak mal untuk melakukan tindak pidana korupsi lagi dan lagi.¹⁷

2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Pengertian Tindak Pidana Korupsi menurut Peraturan Perundang-undangan. Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif), pengertian tindak pidana korupsi memiliki pengertian lain namun masih serupa dengan pengertian-pengertian sebagaimana dikemukakan oleh para ahli di atas. Sudarto mengatakan bahwa istilah korupsi baru menjadi istilah hukum untuk pertama kalinya di tertuang dalam Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹⁸

¹⁷**Kristian, S.H., M.Hum & Dr. Yopi Gunawan, S.H., M.H, M.M.** Tindak Pidana Korupsi Kajian terhadap harmonisasi antara hukum nasional dan the united nations convention against corruption (UNCAC), Bandung, PT refika aditama, 2015, hlm. 25.

¹⁸**Hermien Hadiati Koeswadji**, Op.Cit. hlm.34

Dalam konsideran Peraturan Penguasa Militer tersebut dikatakan bahwa “berhubung tidak adanya kelancaran dalam usaha-usaha dalam upaya memberantas perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara yang oleh khalayak ramai dinamakan tindak pidana korupsi, perlu segera menetapkan suatu tat kerja untuk dapat menerobos kemacetan dalam usaha-usaha memberantas tindak pidana korupsi”.¹⁹

Dalam perkembangan saat ini, Undang-undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang No. 20 Tahun 2001 dianggap paripurna dan diharapkan benar-benar dapat menjadi alat untuk menanggulangi (mencegah dan memberantas) tindak pidana korupsi yang dirasa sudah tumbuh subur.

Pada dasarnya, prinsip hukum pidana formil yang akan diberlakukan bagi Undang-undang hukum pidana khusus (yang dalam hal ini berkaitan dengan tindak pidana korupsi) secara umum tetap memberlakukan hukum acara pidana bersumber pada kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), kecuali yang diatur secara khusus yang bersangkutan. Oleh karena itu, dalam hal hukum acara pidana berkaitan dengan tindak pidana korupsi tetap berlaku hukum acara dalam kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), kecuali dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatur secara khusus

¹⁹Ibid.

3. Faktor-Faktor Dasar Penyebab Tindak Pidana Korupsi

Pada dasarnya terdapat banyak faktor penyebab tindak pidana korupsi. Oleh karenanya, merupakan suatu yang sangat sulit untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab dilakukannya tindak pidana korupsi secara keseluruhan. **Thomas Hobbes** melihat tindak pidana korupsi sebagai persoalan biasa, bukan kejahatan.²⁰ Menurut filosofi ini, tindak pidana korupsi merupakan sesuatu yang alamiah sifatnya.²¹ Tindak pidana korupsi berkaitan erat dengan karakter hakiki dalam diri manusia itu sendiri.²² Karakter hakiki manusia itu memengaruhi perspektif terhadap lingkungan atau masyarakat.²³ Dengan demikian, karakter hakiki manusia akan memengaruhi sebuah sistem dimana ia hidup.²⁴ Pernyataan **Hobbes** di atas jika dikaji dalam perspektif filsafat hukum tentu akan menghasilkan 3 (tiga) pokok permasalahan, yaitu akar epistemologis tindak pidana korupsi, akar antropologis persoalan tindak pidana korupsi, dan akar sosiologis manusia melakukan tindak pidana korupsi.

Robert Klitgaard menyatakan bahwa penyebab utama tindak pidana korupsi adalah pemberian hadiah yang sudah merupakan adat istiadat.²⁵ Kebiasaan-kebiasaan memberikan hadiah ini (khususnya untuk negara-negara dengan budaya ketimuran) terus dilakukan sehingga dianggap sebagai suatu hal

²⁰ **Adrian Blau**, *Hobbes on Corruption*, UK, University of Manchester Publisher, 2009. Page. 52.

²¹ Ibid.

²² Ibid.

²³ Ibid.

²⁴ Ibid.

²⁵ **Rohim**, Op.Cit., hlm. 83.

yang wajar dan dalam perkembangannya kemudian berkembang menjadi suap (seolah membudaya). Tidak hanya sebatas itu, kebiasaan memberikan hadiah dalam perkembangannya dapat menjadi tindak pidana korupsi (gratifikasi).

Baharuddin Lopa menyatakan bahwa lemahnya sistem merupakan salah satu sebab terjadinya tindak pidana korupsi di berbagai sektor.²⁶ Birokrasi dewasa ini seperti dikeluhkan oleh pengusaha nasional termasuk pengusaha kecil maupun pengusaha asung karena masih banyaknya mata rantai yang harus mereka lalui untuk memperoleh izin atau fasilitas-fasilitas tertentu (misalnya saja fasilitas kredit).²⁷ Keadaan yang kurang menggembirakan ini, dalam praktiknya menyebabkan suburnya suap menyuap dan pemberian komisi sebagai salah satu bentuk perbuatan tindak pidana korupsi, bahkan tanpa berliku-likunya mekanisme administrasi, tindak pidana korupsi ini tetap saja berlangsung.²⁸

Penyebab dilakukannya tindak pidana korupsi dapat pula dijabarkan menjadi beberapa aspek, yaitu sebagai berikut:²⁹

1. Aspek Individu Pelaku

- a. Sifat Tamak Manusia
- b. Moral yang kurang kuat
- c. Penghasilan yang kurang mencukupi

²⁶**Baharuddin Lopa**, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Kompas, 23 Maret 2002, hlm. 15.

²⁷Ibid.

²⁸Ibid.

²⁹Lihat juga analisa lebih detail sebagaimana dipaparkan oleh badan pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKB) yang berjudul “Strategi Pemberantasan Korupsi”.

- d. Kebutuhan hidup yang mendesak
- e. Gaya hidup yang konsumtif
- f. Malas atau tidak mau bekerja
- g. Ajaran agama yang kurang diterapkan

2. Aspek Organisasi

- a. Kurang adanya sifat keteladanan seorang pemimpin;
- b. Tidak ada kultur organisasi yang benar;
- c. Kultur organisasi biasanya mempunyai pengaruh kuat terhadap anggotanya, apabila kultur organisasi tidak dikelola dengan baik;
- d. Sistem akuntabilitas yang benar di instansi pemerintah kurang memadai;
- e. Kelemahan sistem pengendalian manajemen;
- f. Manajemen cenderung menutupi tindak pidana korupsi yang terjadi didalam organisasi; dan
- g. Lain sebagainya.

3. Aspek Individu dalam Organisasi dimana Ia Berada

- a. Nilai-nilai di masyarakat Kondusif untuk terjadinya tindak pidana korupsi. (korupsi dapat ditimbulkan dari budaya masyarakat).
- b. Masyarakat kurang menyadari sebagai korban utama dari tindak pidana korupsi. Anggapan masyarakat umum yang dirugikan dari tindak pidana korupsi hanya negara. Padahal bila negara rugi, maka yang rugi adalah masyarakat juga, karena proses anggaran pembangunan bisa berkurang karena dikorupsi. Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi bisa dicegah dan diberantas apabila masyarakat ikut aktif. Di mana pada umumnya

masyarakat berpandangan masalah tindak pidana korupsi itu adalah tanggung jawab pemerintah. Apabila masyarakat ikut andil dalam memberantasnya, maka pada dasarnya tindak pidana korupsi itu dapat dicegah.

Aspek-aspek yang menghambat penanggulangan tindak pidana korupsi tersebut setidaknya terdiri dari aspek politis, aspek sosial kemasyarakatan, aspek ekonomi dan pembangunan, dan aspek sosial budaya, aspek kesempatan, aspek dari faktor keinginan memperoleh uang dengan cara yang mudah dan singkat.

Disamping berbagai faktor tersebut diatas, maraknya dan lemahnya penanggulangan tindak pidana korupsi khususnya yang terjadi di Indonesia disebabkan karena beberapa hal berikut ini:

1. Belum maksimalnya pengembangan norma hukum dan penegakan hukum
2. Belum optimalnya pencegahan segala bentuk tindak pidana korupsi
3. Belum optimalnya kerja sama dan koordinasi

Mengutip kembali pernyataan dari **indriyanto senoadji** yang menyatakan bahwa untuk mmaksimalkan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana, diperlukan adanya pembaruan terhadap berbagai perangkat peraturan dan ketentuan normatif (legal reform).³⁰ Dalam rangka itu, pada tanggal 18 Desember 2003 di markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Pemerintah Republik Indonesia telah ikut menandatangani Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa

³⁰Indriyanto Seno Adji, Op.Cit., hlm. 43.

tentang Antikorupsi, *The United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) yang di adopsi oleh sidang ke-58 Majelis Umum melalui Resolusi Nomor 58/4 pada tanggal 31 Oktober 2003. Tiga tahun setelahnya, pada tanggal 18 April 2006 konvensi ini di ratifikasi melalui Undnag-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *The United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi, 2003).

Ratifikasi konvensi ini dipandang perlu karena selama ini pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia melalui peraturan perundang-undangan sejak tahun 1957 tetap saja belum efektif dan dipandang belum memadai karena belum adanya kerja sama internasional dalam masalah pengembalian hasil tindak pidana korupsi. Sebagaimana diungkapkan oleh **Andi Hamzah** bahwa kekurangan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah belum diaturnya ketentuan masalah kerja sama internasional dalam penanggulangan tindak pidana korupsi, kerja sama tersebut termasuk pula pendidikan dan pelatihan para penegak hukum yang di sponsori oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).³¹

Menurut hemat penulis, kekurangan Undnag-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak hanya belum diaturnya ketentuan masalah kerja sama internasional meainkan banyak ketentuan-ketentuan dalam

³¹ **Andi Hamzah**, Op. Cit, hlm.219.

konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) antikorupsi yang belum diadopsi dan belum dilaksanakan dalam sistem hukum nasional.

B. KEJAKSAAN

1. Sejarah Kejaksaan

Dahulu baik di Eropa (Belanda, Jerman, Perancis, dan lain-lain) maupun di Indonesia tidak mengenal adanya suatu lembaga penuntutan dalam hal ini adalah kejaksaan yang tugasnya khusus untuk atas nama atau masyarakat yang mengadakan tuntutan pidana terhadap pelaku delik. Pada masa itu tidak ada perbedaan antara perdata dan pidana. pihak yang drugikan yang melakukan tuntutan pidana kepada hakim.

Di Indonesia dahulu dikenal pejabat Negara yang disebut *adhyaksa*. *Adhyaksa* berasal dari bahasa sansekerta yang diartikan sebagai jaksa, akan tetapi dahulu fungsinya sama dengan hakim karena dahulu tidak dikenal adanya lembaga penuntutan.

Andi zainal abidin farid mengartikan *Adhyaksa* dalam berbagai arti seperti:³²

1. *Superintendent* atau *superindance*.
2. Pengawas dalam urusan kependekatan, baik agama Budha maupun Syiwa dan mengepalai kuil-kuil yang didirikan sekitar istana.

³² **Djoko Prakoso**, 1988, Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana, Liberty, Yogyakarta. Hal. 13

3. Disamping itu juga bertugas sebagai hakim dan sebagai demikian ia berada dibawah perintah serta pengawasan mahapatih.
4. “*Adhyaksa*” sebagai hakim sedangkan “*dharmaadyaksa*” sebagai “*opperechter*” nya.
5. “*Adhyaksa*” sebagai “*rechter van instructie bijde lanraad*”, yang kalau dihubungkan dengan jabatan dunia modern sekarang dapat disejajarkan dengan Hakim Komisaris.

Dari uraian diatas, maka jabatan jaksa sesungguhnya mempunyai kewenangan yang luas. Fungsi senantiasa dikaitkan dengan bidang yudikatif bahkan pada masanya hubungan pula dengan bidang keagamaan.

Dahulu *adhyaksa* tidaklah sama dengan tugas utama penuntut umum dewasa ini lembaga penuntut umum seperti sekarang ini tidak bertugas sebagai hakim seperti *adhyaksa* dahulu kala, tetapi keduanya mempunyai persamaan tugas yaitu penyidikan perkara, penuntutan dan melakukan tugas sebagai “Hakim Komisaris”. Penuntut umum dengan kekuasaan dan organisasi seperti sekarang ini berasal dari Perancis. Belandalah yang bercermin kepada sistem Perancis, melalui dan mulai asas konkordansi membawanya pula keindonesia, terutama dengan paket perundang-undangan yang mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1848.

Diciptakan suatu jabatan yang disebut *Procureur General* (seperti Jaksa Agung sekarang). Disamping itu dikenal pula istilah *of ficiere van justitie* sebagai penuntut umum bagi golongan Eropa dan yang dipersamakan. Dalam *inlands reeglement* dikenal *Megistraat* sebagai penuntut umum, tetapi belum

berdiri sendiri diperintah oleh *Residen* dan *Asisten Residen*. Sesudah *Inlands Reeglement* diubah menjadi HIR pada tahun 1941, barulah dikenal lembaga penuntut umum yang berdiri sendiri dibawah *Procureur General*, bagi orang Bumiputra, itu pun dalam prakteknya, karena masih kurangnya sarjana hukum pada masa itu, maka di kota-kota jabatan *Magistraat* itu masih dirangkap oleh *Asisten Residen*. Belanda sendiri baru pada tanggal 18 April 1827 ketika berlakunya *Rrechterlijke Organisatie en het beleid der justitie*, diadakan lembaga penuntut umum yang berdiri mengikuti sistem Perancis. Suatu asas yang terpenting dari penuntut umum itu satu dan tidak terbagikan (*een en ondeelbaarheid*) dan bergantungnya pada kekuasaan eksekutif.

Sejak masa pemerintahan Jepang, nampaknya para jaksa memiliki kembali statusnya yaitu sebagai penuntut umum yang sebenarnya. Ketika Jepang berkuasa di Indonesia maka jabatan *Asisten Residen* segera dihapuskan. Situasi yang demikian mengakibatkan kedudukan jaksa mengalami perubahan mendasar. Dalam masa ini, semua tugas dan wewenang *Asisten Residen* dalam penuntutan perkara pidana diberikan kepada Jaksa dengan jabatan *Tio Kensatsu Kyokuco* atau Kepala Kejaksaan pada Pengadilan Negeri, serta berada dibawah pengawasan *Koo Too Kensatsu Kyokuco* atau Kepala Kejaksaan Tinggi.

Selanjutnya dengan *Osamurai* No. 49, Kejaksaan dimasukkan dalam wewenang *Cianbu* atau Departemen Keamanan dengan demikian tugas jaksa telah ditentukan yaitu mencari kejahatan dan pelanggaran (sebagai pegawai penyidik), menuntut perkara (pegawai penuntut umum), dan menjalankan putusan hakim (pegawai eksekusi).

Setelah Indonesia mengalami kemerdekaan pada tahun 1945, sistem hukum yang berlaku tidak segera mengalami perubahan. Untuk mengatasi situasi tersebut, maka undang-undang maupun peraturan-peraturan yang ada sebelum kita merdeka tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, peraturan-peraturan yang mengatur tentang kedudukan Kejaksaan pada pengadilan-pengadilan di Indonesia tetap memakai peraturan lama seperti sebelum Indonesia merdeka. Dengan maklumat Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 1 Oktober 1945, semua kantor Kejaksaan yang dahulunya masuk Departemen Keamanan atau Cianbu di pindah kembali ke dalam Departemen Kehakiman atau *Shihoobu*.³³ Ketika itu Kejaksaan yang pernah bersama dengan Kepolisian dalam naungan Departemen Dalam Negeri, kemudian memisahkan diri masuk berintegrasi ke dalam Departemen Kehakiman R.I. Dengan kembalinya Kejaksaan ke dalam Departemen Kehakiman maka cocok dan tugas kewajiban para jaksa yang diberikan ketika pendudukan tentara Jepang tidak mengalami perubahan. Oleh karena itu Peraturan Pemerintah tanggal 10 Oktober 1945 Nomor 2, telah menetapkan bahwa semua undang-undang dan peraturan yang dahulu tetap berlaku sampai undang-undang tersebut diganti. Dengan demikian, sejak proklamasi kemerdekaan, tugas *Openbaar Ministerie* atau pengadilan terbuka pada tiap-tiap Pengadilan Negeri menurut HIR (*Herziene Inlandsch Reglemeent*), dijalankan oleh *Magistraat*, oleh karena itu

³³<<http://www.hukumoline.com//0210/05/utama/mund01.htm>>, diakses tanggal 22 september 2017 pukul 15:36

perkataan *Magistraat* dalam HIR diganti dengan sebutan Jaksa, sehingga Jaksa pada waktu itu adalah sebagai Penuntut Umum pada Pengadilan Negeri.³⁴

Dalam perkembangan selanjutnya setelah diundangkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia, maka Kejaksaan keluar dari Departemen Kehakiman Republik Indonesia dan berdiri sendiri sampai sekarang.

2. Kedudukan Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, keberadaan institusi Kejaksaan sebagai penegak hukum telah dikenal di Indonesia jauh sebelum masa penjajahan. Meskipun mengalami pergantian nama dan pemerintah, fungsi dan tugas kejaksaan tetap sama yaitu melakukan penuntutan terhadap perkara-perkara kriminal dan bertindak sebagai penggugat atau tergugat dalam perkara perdata.³⁵

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, menurut Pasal 24 ayat 1 UUD 1945, ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan mengenai badan-badan lain tersebut dipertegas dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan mengenai badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman meliputi Kepolisian Negara RI, Kejaksaan RI, dan badan-badan lain yang diatur dengan undang-undang.

³⁴Ibid.

³⁵Effendi, Marwan, 2005. *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Hal. 120.

Selanjutnya, Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 2 menegaskan bahwa:

1. Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam undang-undang ini disebut Kejaksaan lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.
2. Kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara merdeka.
3. Kejaksaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah satu dan tidak terpisahkan.

Mencermati isi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 diatas, dapat diidentifikasi beberapa hal, yaitu:

1. Kejaksaan sebagai suatu lembaga pemerintahan;
2. Kejaksaan melakukan kekuasaan (kewenangan) di bidang penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang;
3. Kekuasaan (kewenangan) itu dilakukan secara merdeka;
4. Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan.

Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 2, menegaskan bahwa:

1. Kejaksaan Republik Indonesia selanjutnya dalam undang-undang ini disebut Kejaksaan, adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.
2. Kejaksaan adalah salah satu dan tidak terpisah-pisahkan dalam melakukan penuntutan.

Dari pengaturan Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1991 tersebut dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu:

1. Kejaksaan sebagai suatu lembaga pemerintahan;
2. Kejaksaan melakukan kekuasaan (kewenangan) di bidang penuntutan;
3. Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan.

Dalam Penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang ini dijelaskan bahwa Kejaksaan adalah satu-satunya lembaga pemerintahan pelaksanaan kekuasaan negara yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang penuntutan dalam penegakan hukum dan keadilan di lingkungan peradilan umum. Kemudian Penjelasan Pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan” adalah landasan pelaksanaan tugas dan wewenangnya di bidang penuntutan yang bertujuan memelihara kesatuan kebijakan di bidang penuntutan, sehingga dapat menampilkan ciri khas yang menyatu dalam tata pikir, tata laku, dan tata kerja kejaksaan. Oleh karena itu, kegiatan penuntutan di pengadilan oleh Kejaksaan tidak akan berhenti hanya karena jaksa yang semula bertugas berhalangan. Dalam hal demikian, tugas penuntutan oleh Kejaksaan akan tetap dilakukan sekalipun oleh Jaksa Pengganti.

Kemudian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 1 ayat 1 menegaskan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia selanjutnya disebut Kejaksaan, ialah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas sebagai Penuntut Umum. Dalam ayat 2 menyebutkan bahwa Kejaksaan dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum negara. Pasal 3 menetapkan bahwa bahwa Kejaksaan adalah satu dan tak dapat dipisah-pisahkan.

Memilik pengaturan Pasal 1 dan Pasal 3 undang-undang tersebut, dapat ditarik beberapa hal penting, yaitu:

1. Kejaksaan sebagai alat negara penegak hukum
2. Tugas utama Kejaksaan adalah sebagai penuntut umum
3. Kejaksaan harus menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum negara
4. Kejaksaan adalah satu dan tak dapat dipisah-pisahkan

Dalam Penjelasan Umum undang-undang tersebut, diuraikan bahwa Kejaksaan RI, seperti halnya dengan alat-alat negara lainnya adalah alat revolusi untuk melaksanakan pembangunan nasional semesta yang berencana menuju tercapainya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila atau masyarakat Sosialis Indonesia yang memenuhi amanat penderitaan rakyat, karena negara Republik Indonesia adalah negara Hukum, segala tindakan yang dilakukan oleh Kejaksaan untuk menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum negara.

Dalam Penjelasan Pasal ayat 2 dinyatakan bahwa istilah “menjunjung tinggi” adalah termaksud pengertian “memberi perlindungan”. Sementara itu, dalam

Penjelasan Pasal 3 ayat 1 dinyatakan bahwa dalam menjalankan tugasnya, pejabat-pejabat Kejaksaan harus mengindahkan hubungan hierarki di lingkungan pekerjaannya.

Bila ketiga undang-undang mengenai kedudukan Kejaksaan RI dalam penegakan hukum di Indonesia di atas dikomparasi, tampak ada beberapa persamaan namun ada pula perbedaan, yaitu:

1. Kesamaan ketiga Undang-Undang Kejaksaan (Undang-Undang No. 16 Tahun 2004, Undang-Undang No. 5 Tahun 1991, dan Undang-Undang No.15 Tahun 1961) berkaitan dengan kedudukan Kejaksaan adalah pertama, Kejaksaan melakukan kekuasaan (kewenangan) utama di bidang penuntutan.
2. Kesamaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1991 yakni Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melakukan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Berbeda dari pengaturan Undang-Undang No.15 Tahun 1961 yang menegaskan bahwa Kejaksaan adalah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas sebagai penuntut umum.
3. Perbedaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1991 dan Undang-Undang No.15 Tahun 1961 terletak pada unsur bahwa “kekuasaan (kewenangan) itu dilakukan secara merdeka”. Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 mengatur dengan tegas bahwa kejaksaan memiliki kemerdekaan dan kemandirian dalam melakukan

kekuasaan negara di bidang penuntutan, sedangkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1991 dan Undang-Undang No. 15 tahun 1961 tidak mengatur hal ini.

4. Perbedaan lainnya adalah Undang-Undang No. 15 tahun 1961 menegaskan secara eksplisit bahwa Kejaksaan harus menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum negara, sementara Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 5 tahun 1991 tidak menegaskan hal tersebut.

Mencermati pengaturan di atas dapat dijelaskan bahwa kedudukan Kejaksaan sebagai suatu Lembaga pemerintahan yang melakukan kekuasaan negara di bidang penuntutan, bila dilihat dari sudut kedudukan, mengandung makna bahwa Kejaksaan merupakan suatu lembaga yang berada disuatu kekuasaan eksekutif. Sementara itu, bila dilihat dari sisi kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penuntutan berarti Kejaksaan menjalankan kekuasaan yudikatif. Disinilah terjadinya ambivalensi kedudukan Kejaksaan RI dalam penegakan hukum di Indonesia.

Selanjutnya, sehubungan dengan makna kekuasaan Kejaksaan dalam melakukan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka, penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi Jaksa seperti yang seperti yang digariskan dalam “*Guidelines on the Role of Prosecutors* dan *International Association of Prosecutors*”.

Lebih jauh, dalam penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, antara lain dinyatakan bahwa diberlakukannya Undang-Undang ini adalah untuk pembaharuan Kejaksaan, agar kedudukan dan peranannya sebagai lembaga pemerintahan lebih mantap dan dapat mengemban kekuasaan Negara di bidang penuntutan, yang bebas dari pengaruh kekuasaan pihak mana pun. Dalam pengertian lain, Kejaksaan, dalam melaksanakan tugasnya, hendaknya merdeka dan terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan lainnya dalam upayanya mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Bila kedudukan Kejaksaan sebagai suatu lembaga pemerintahan dikaitkan dengan kewenangan Kejaksaan melakukan kekuasaan Negara di bidang penuntutan secara merdeka, di sini terdapat kontradiksi dalam pengaturannya (*Dual Obligation*). Dikaitkan demikian, adalah mustahil Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengatur kekuasaan lainnya, karena kedudukan Kejaksaan berada di bawah kekuasaan eksekutif. Kesimpulan ini, diperkuat lagi dengan kedudukan Jaksa Agung, sebagai pemimpin dan penanggung jawab tertinggi dalam bidang penuntutan, adalah sebagai Pejabat Negara yang diangkat dan diberhentikan oleh serta bertanggung jawab kepada Presiden.

Dalam konteks Ilmu Manajemen Pemerintahan Agung, sebagai bawahan Presiden, harus mampu melakukan tiga hal, yaitu:³⁶

1. Menjabarkan instruksi, petunjuk, dan berbagai bentuk kebijakan lainnya dari Presiden dalam tugas dan wewenangnya dalam bidang penegakan hukum;
2. Melaksanakan instruksi, petunjuk, dan berbagai kebijakan Presiden yang telah dijabarkan tersebut; dan
3. Mengamankan instruksi, petunjuk, dan berbagai kebijakan Presiden yang sementara dan telah dilaksanakan.

Dedikasi, loyalitas, dan kredibilitas Jaksa Agung di hadapan Presiden diukur dari sejauh mana Jaksa Agung mampu melakukan ketiga hal tersebut, yang pasti adalah Jaksa Agung harus berusaha melakukan ketiga itu untuk menunjukkan dedikasi, loyalitas, dan kredibilitasnya sebagai pengemban kekuasaan negara di bidang penegakan hukum. Di sinilah letak kecenderungan ketidakmerdekaan Kejaksaan melakukan fungsinya, tugas, dan wewenangnya. Implikasinya adalah keadilan, kepastian hukum, dan kegunaan (kemamfaatan) hukum yang menjadi Cita Hukum bangsa Indonesia, sekaligus yang menjadi tujuan hukum yang

³⁶Ibid., hlm. 125.

mestinya harus diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hanya menjadi cita-cita dan jauh dari kenyataan.³⁷

Kejaksaan Dalam Perspektif Islam

Taat terhadap Ulil Amri hanya taat karena adanya pelimpahan wewenang hukum yang berguna untuk mengatur kesejahteraan rakyat, Ulil Amri yang dimaksudkan juga ialah Kejaksaan itu sendiri karena merupakan salah satu alat negara untuk mencapai tujuan hukum demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Surat An- Nisa' /4:59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahan :

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Surat Al-Ma'idah/5:49.

³⁷<http://hukumpidanadantatanegara.blogspot.com> diakses tanggal 22 September 2017 pukul 16:45

وَأَن اٰحْكُم بَيْنَهُم بِمَا اَنزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ اَن يَفْتَرُوْكَ عَنْ بَعْضِ مَا
 اَنزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكَ ۚ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاَعْلَمُ اَنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ اَن يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوْبِهِمْ ۗ وَاِنَّ كَثِيْرًا
 مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُوْنَ

Terjemahan :

“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.”

Prof Quraish Shihab mengemukakan bahwa kalau diamati ayat-ayat Al-Qur'an yang memerintahkan taat kepada Allah dan rasulnya, ditemukan dua redaksi yang berbeda³⁸. Sekali perintah taat kepada Allah dirangkaikan perintah taat kepada Rasul tanpa mengulangi kata taatilah seperti pada QS. Al-imran ayat 35 dan pada surat An-nisa ayat 59 kata taatilah diulangi , masing-masing sekali ketika memerintahkan taat kepada Allah dan sekali memerintahkan taat kepada Rasulnya.

Para pakar Al-Qur'an menerangkan bahwa apabila perintah taat kepada Allah dan Rasulnya digabung dengan menyebut dengan hanya satu kali kata taatilah, maka hal itu mengisyaratkan bahwa ketaatan yang dimaksud adalah

³⁸ **Muhammad Quraish Shihab**, *Tafsir Al Misbah*, Jilid II (cet. IX; Jakarta: lentera Hati, 2007), h. 483

ketaatan yang diperintahkan Allah , baik yang diperintahkan secara langsung di dalam Al-Qur'an maupun perintahnya yang dijelaskan oleh Rasul menyangkut hal-hal yang bersumber dari Allah, bukan beliau perintahkan secara langsung. Adapun bila perintah taat diulangi, maka disitu rasul mempunyai wewenang serta hak untuk ditaati walaupun tidak ada dasarnya dari Al-Qur'an³⁹. Itu sebabnya perintah taat kepada ulil amri tidak disertai kata taat karena mereka tidak memiliki hak untuk ditaati bila ketaatan terhadap mereka bertentangan dengan ketaatan kepada Allah atau Rasulnya.⁴⁰

Pendapat ulama berbeda tentang makna kata *ulil Amri* . dari segi bahasa kata *Uli* adalah bentuk jamak dari *Wali* yang berarti pemilik atau yang mengurus dan menguasai. Bentuk jamak dari kata tersebut menunjukkan bahwa kalau mereka banyak. Sedangkan kata *Al-amri* adalah perintah atau urusan . dengan demikian *ulil Amri* adalah orang yang berwewenang mengurus urusan kaum muslimin.⁴¹. Perlu dicatat bahwa kata *Al Amru* berbentuk makrifat.. ini menjadikan banyak ulama membatasi wewenang pemilik kekuasaan itu hanya pada persoalan-persoalan kemasyarakatan, bukan persoalan aqidah.⁴²

Dari penjelasan ulama di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa taat terhadap ulil amri hanya taat karena adanya pelimpahan wewenang hukum yang berguna untuk mengatur kesejahteraan rakyat. Berbeda dengan ketaatan terhadap

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Ibid., hlm.484

⁴² Ibid

Allah dan Rasulnya. Kemudian arti taat bukan berarti menerima mentah-mentah perintah tersebut. Tetapi kritis dan ikhlas sepenuh hati melakukannya.

Tentang Ulil Amri setengah ulama berpendapat bukan ulama agama saja bahkan termasuk juga panglima-panglima perang dan penguasa-penguasa besar, petani-petani dalam Negara⁴³. Moh Abduh berpendapat di zaman modern kita ini direktur-direktur pengusaha besar, professor, sarjana di berbagai bidang, wartawan dan lain-lain yang terkemuka di masyarakat adalah Ahlul Halli Wal Aqdi (ahli mengikat dan menguraikat ikat). Berhak diajak bermusyawarah⁴⁴

Oleh sebab itu maka jelaslah bahwa islam memberikan lapangan luas sekali tentang siapa yang patut dianggap Ulil amri, yang patut diajak musyawarah pemungutan suara atau kepala pemerintahan saja menunjuk siapa yang patut, yaitu lalu diakui dan ditaati oleh orang banyak.

3. Tugas dan Kewenangan Kejaksaan RI

Komperasi pengaturan mengenai tugas dan wewenang Kejaksaan RI secara normatif dapat dilihat dalam beberapa ketentuan Undang-Undang mengenai Kejaksaan, sebagaimana yang hendak diketengahkan di bawah ini. Ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 30 yaitu:

1. Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

a. Melakukan penuntutan;

⁴³ **Prof dr Hamka**, *Tafsir Al Azhar*, Juz 4, 5, 6 (Jakarta: Panjmas, 1983), h. 129

⁴⁴ Ibid., hlm.132

- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang;
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
2. Di bidang perdata dan tata usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah
3. Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c. Pengamanan peredaran barang cetakan;
 - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara;
 - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik criminal.

Selanjutnya, Pasal 31 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menegaskan bahwa Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri.

Kemudian, Pasal 32 Undang-Undang tersebut menetapkan bahwa disamping tugas dan wewenang tersebut dalam Undang-Undang ini, Kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan undangundang. Selanjutnya Pasal 33 mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan Negara atau instansi lainnya. Kemudian Pasal 34 menetapkan bahwa Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.

Setelah mencermati isi beberapa pasal di atas dapat disimpulkan bahwa tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Melakukan penuntutan;
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;

- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang;
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
2. Di bidang perdata dan tata usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
3. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c. Pengamanan peredaran barang cetakan;
 - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara;
 - e. Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama; dan
 - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal
4. Dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak;
5. Membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan badan Negara lainnya;
6. Dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.

Di samping tugas dan wewenang Kejaksaan RI di atas, Jaksa Agung memiliki tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, yaitu;

- a. Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Kejaksaan
- b. Mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang
- c. Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum
- d. Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada kepala Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha Negara
- e. Dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara-perkara
- f. Mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara-perkara pidana sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.

Selanjutnya Pasal 36 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 mengatur bahwa:

- (1) Jaksa Agung memberikan izin kepada tersangka atau terdakwa untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit dalam luar negeri, kecuali dalam
- (2) Keadaan tertentu dapat dilakukan perawatan di luar negeri
- (3) Izin secara tertulis untuk berobat atau menjalani perawatan di dalam negeri diberikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri setempat atas nama Jaksa Agung,

sedangkan untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit di luar negeri hanya diberikan oleh Jaksa Agung

- (4) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2, hanya diberikan atas dasar rekomendasi dokter, dan dalam hal diperlukannya perawatan di luar negeri rekomendasi tersebut dengan jelas menyatakan kebutuhan untuk itu yang dikaitkan dengan belum mencukupinya fasilitas perawatan tersebut didalam negeri.

Kemudian Pasal 37 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menegaskan bahwa:

- (1) Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakn secara independent demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan kepada Presieden dan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan prinsip akuntabilitas.

Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia diatur tugas dan wewenang kejaksaan RI. Pasal 27 menegaskan bahwa:

- (1) Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
- a. Melakukan penuntutan dalam perkara pidana;
 - b. Melaksanakan penetaan hakim dan putusan pengadilan;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat;

- d. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan kepengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- (2) Di bidang perdata dan tata usaha Negara, Kejaksaan dengan khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah;
- (3) Dalam bidang ketertiban dan ketentuan umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c. Pengamanan peredaran barang tertentu;
 - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - e. Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama;
 - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik criminal.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 Pasal 28 menetapkan bahwa Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri.

Sementara itu, Pasal 29 Undang-Undang tersebut menetapkan bahwa disamping tugas dan wewenang dalam Undang-Undang ini, Kejaksaan dapat

diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Selanjutnya Pasal 30 menegaskan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan-badan penegak hukum dan keadilan serta badan Negara atau instansi lainnya. Kemudian Pasal 31 mengatur bahwa Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya

Mengenai tugas dan wewenang Jaksa Agung diatur dalam beberapa Pasal di bawah ini. Pasal 32 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 mengatur bahwa jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Kejaksaan;
- b. Mengkoordinasikan penanganan perkara pidana tentu dengan institusi terkait berdasarkan Undang-Undang yang pelaksanaan koordinasinya ditetapkan oleh Presiden;
- c. Menyampingkan perkara demi kepentingan umum;
- d. Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha Negara;
- e. Mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana;
- f. Menyampaikan pertimbangan kepada Presiden mengenai permohonan grasi dalam hal pidana mati;

- g. Mencegah atau melarang orang-orang tertentu untuk masuk kedalam atau meninggalkan wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana;

Mengenai tugas dan wewenang Jaksa Agung diatur dalam beberapa Pasal di bawah ini. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 mengatur bahwa jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang:

1. Jaksa Agung memberikan izin kepada seseorang tersangka atau terdakwa dalam hal tertentu untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit, baik di dalam maupun di luar negeri;
2. Izin secara tertulis untuk berobat atau menjalani perawatan di dalam negeri diberikan oleh kepada Kepala Kejaksaan negeri setempat atas nama Jaksa Agung, sedangkan untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit di luar negeri hanya diberikan kepada Jaksa Agung;
3. Izin, sebagaimana yang dimaksud dengan ayat (1) dan (2), hanya di berikan atas dasar rekomendasi dokter, dan dalam hal diperlukannya perawatan di luar negeri rekomendasi tersebut dengan jelas menyatakan untuk itu yang dikaitkan dengan belum mencukupinya fasilitas perawatan tersebut di dalam negeri.

Kemudian tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang ketentuan-ketentuan pokok Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam Pasal 2 Undang-Undang itu ditegaskan

bahwa dengan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam pasal 1, Kejaksaan mempunyai tugas:

- (1) Mengadakan penuntutan perkara-perkara pidana pada pengadilan yang berwenang dan Menjalankan keputusan dan penetapan Hakim Pidana.
- (2) Mengadakan penyidikan lanjutan terhadap kejahatan dan pelanggaran serta mengawasi dan mengoordinasikan alat-alat penyidik menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan lain-lain peraturan Negara.
- (3) Mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara.
- (4) Melaksanakan tugas-tugas khusus lainnya yang diberikan kepadanya oleh suatu Negara.

Selanjutnya dalam Pasal 8 Undang-Undang itu ditegaskan bahwa Jaksa Agung dapat mengenyampingkan suatu perkara berdasarkan kepentingan umum. Kemudian Pasal 9 mengatur bahwa Jaksa Agung dan jaksa-jaksa lainnya dalam lingkungan daerah hukumnya menjaga agar penahanan dan perlakuan terhadap orang yang di tahan oleh pejabat-pejabat lain dilakukan berdasarkan hukum.

Mencermati peraturan beberapa ketentuan pasal dari ketiga Undang-Undang Kejaksaan RI di atas, persamaan dan perbedaan pengaturan mengenai tugas dan wewenang Kejaksaan RI dalam ketiga Undang-Undang tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

Persamaan pengaturan dari ketiga Undang-Undang tersebut (Undang-Undang NO.16/2004, Undang-Undang No.5/1991, Undang-Undang No.15/1961) adalah dimana pertama, dalam bidang pidana, Kejaksaan melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan dan putusan pengadilan. Sementara itu, kejaksaan dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat di tegaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991. dalam melakukan putusan pidana bersyarat dan putusan pidana. Pengawasan, dan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang, hanya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004.

Selanjutnya, ketiga Undang-Undang kejaksaan di atas mengatur tugas Kejaksaan untuk melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum melimpahkan perkara itu ke pengadilan dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Dalam penjelasan Pasal 30 ayat 1 huruf e Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dan penjelasan 27 ayat 1 huruf d dijelaskan bahwa untuk melengkapi berkas perkara, pemeriksaan tambahan dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Tidak dilakukan terhadap tersangka;
- b. Hanya terhadap perkara-perkara yang sulit pembuktiannya, dan atau dapat meresahkan masyarakat, dan atau yang dapat membahayakan keselamatan Negara;

- c. Harus dapat diselesaikan dalam waktu 14 hari setelah dilaksanakan ketentuan Pasal 110 dan 138 ayat 2 Undang-Undang 8 Tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana;
- d. Prinsip koordinasi dan kerja sama dengan penyidik.

Suatu hal yang hanya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 (Pasal 30 ayat 1 huruf d), yaitu bahwa Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Adapun tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang dimaksud adalah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 30 ayat 1 huruf d ini bahwa kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kedua, dalam bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991. Ketiga, dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengaman kebijakan penegakan hukum, pengamanan peredaran cetakan, pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan

agama, penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. Beberapa kegiatan ini ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991.

Kejaksaan dapat meminta hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat yang lain yang layak jika yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 31 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 Pasal 28, sementara itu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tidak menegaskan hal ini. Selain tugas dan wewenang tersebut, Kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 32 dan Undang-Undang Nomor 1991 Pasal 29, sementara Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tidak menegaskan hal ini. Selanjutnya, ketiga Undang-Undang Kejaksaan itu menegaskan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan Negara atau instansi lainnya.

Di samping itu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 mengatur tugas dan wewenang Jaksa Agung, yaitu:

- a. Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Kejaksaan;

- b. Mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang;
- c. Mengkoordinasikan penanganan perkara pidana tertentu dengan instansi terkait berdasarkan Undang-Undang yang pelaksanaan koordinasinya ditetapkan oleh Presiden;
- d. Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;
- e. Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha Negara;
- f. Dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana;
- g. Menyampaikan pertimbangan kepada Presiden mengenai permohonan garasi dalam hal pidana mati;
- h. Mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pembahasan mengenai dasar kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan Kejaksaan sudah cukup lama, baik yang dilakukan akademisi maupun praktisi hukum, bahkan setidaknya telah dua kali di uji dalam Majelis Mahkamah Kosntitusi tentang keabsahan dasar hukum penyidikan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan dan keduanya tidak dapat diterima. Berikut disampaikan dasar kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan dilihat dari aspek Historis dan aspek yuridis

Aspek Historis

Bahwa Kejaksaan telah melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi sejak masa berlakunya *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) sampai dengan saat ini. Secara historis kewenangan penyidikan Kejaksaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 yang bertujuan untuk mengatur kembali adanya pengadilan di Indonesia. Sejak saat itu HIR mempunyai peranan yang penting karena HIR merupakan satu-satunya hukum acara pidana yang berlaku di seluruh Indonesia.

Pada masa HIR penyidikan merupakan bagian dari penuntutan. Kewenangan yang demikian menjadikan Penuntut Umum (Jaksa) sebagai koordinator penyidikan bahkan dapat melakukan sendiri penyidikan. [*vide* Pasal 38 *juncto* Pasal 39 *juncto* Pasal 46 Ayat (1) H.I.R].

Pada tahun 1961, Undang-Undang Kejaksaan Nomor 15 Tahun 1961 mengatur secara tegas, tugas dan wewenang Kejaksaan dalam penyidikan [*vide* Pasal 2 *juncto* Pasal 7 Ayat (2)]. Pada tahun 1971, dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana secara tegas dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 26 disebutkan Jaksa Agung selaku penegak hukum dan penuntut umum tertinggi memimpin/mengkoordinir tugas kepolisian represif/yustisiel dalam penyidikan perkara-perkara korupsi.

Pada tahun 1981 dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, maka HIR tidak berlaku dan terjadi perubahan yang fundamental di bidang penyidikan. KUHAP mengatur wewenang penyidikan dan penyidikan lanjutan dalam perkara pidana umum sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 38, 39 dan 46 H.I.R ditiadakan. Namun demikian, wewenang Jaksa untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana tertentu seperti tindak pidana ekonomi, korupsi dan subversi masih tetap ada [*vide* Pasal 284 Ayat (2) KUHAP jo Pasal 17 PP No. 27 Tahun 1983 beserta penjelasannya jo PP No. 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP No. 27 Tahun 1983]. Pada tahun 1991 dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan RI masih memiliki kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi.

Kemudian dalam perkembangan penegakan hukum setelah berlakunya KUHAP, kewenangan penyidikan yang diberikan kepada Kejaksaan diatur lebih lanjut dengan dikeluarkannya beberapa perundang-undangan, antara lain:

1. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
2. Pasal 26 juncto Pasal 39 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Pasal 11 Ayat (1) juncto Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;

4. Pasal 44 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;
5. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;
6. Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dimana undang-undang mengamanatkan kepada Kejaksaan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu antara lain tindak pidana korupsi dan pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat.

Aspek Yuridis

Bahwa kewenangan penyidikan Kejaksaan diatur dalam beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 284 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP:

"Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan maka terhadap semua. perkara diberlakukan ketentuan undang-undang dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi ".

Eksistensi Pasal 284 Ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP merupakan dasar lanjutan untuk memperkuat kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan sebagaimana secara tegas dinyatakan dalam Penjelasan Umum butir 3 UU Nomor 16 Tahun 2004, yang

menyebutkan "*Kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk melakukan penyidikan, misalnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*".

2. Butir 1 di atas dipertegas kembali dengan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP yang berbunyi "Penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh penyidik, **jaksa**, dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan". Oleh karenanya berdasarkan ketentuan tersebut tetap dimungkinkan bagi Kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi.
3. Kemudian dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme disebutkan:
"Apabila dalam hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) ditemukan petunjuk adanya korupsi, kolusi atau nepotisme, maka hasil pemeriksaan tersebut disampaikan kepada instansi yang berwenang sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk ditindaklanjuti "

Dalam Penjelasan Pasal 18 Ayat (3) UU Nomor 28 Tahun 1999, dinyatakan bahwa: "*Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk mempertegas atau menegaskan perbedaan yang mendasar antara tugas Komisi Pemeriksa selaku pemeriksa harta kekayaan Penyelenggara Negara dan fungsi Kepolisian dan Kejaksaan. Fungsi pemeriksaan yang dilakukan oleh Komisi Pemeriksa sebelum seseorang diangkat selaku pejabat negara adalah bersifat pendataan, sedangkan pemeriksaan yang dilakukan sesudah pejabat negara selesai menjalankan jabatannya bersifat evaluasi untuk menentukan ada atau tidaknya petunjuk tentang korupsi, kolusi dan nepotisme.*

Yang dimaksud dengan petunjuk dalam pasal ini adalah fakta-fakta atau data yang menunjukkan adanya unsur-unsur korupsi, kolusi dan nepotisme. Yang dimaksud instansi yang berwenang adalah Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Kejaksaan Agung dan Kepolisian."

4. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

"Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang undang ini "

5. Pasal 27 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

"Dalam hal ditemukan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dapat dibentuk tim gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung".

6. Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi:

(4) Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi berpendapat bahwa perkara tersebut diteruskan, Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan penyidikan sendiri atau dapat melimpahkan perkara tersebut kepada penyidik kepolisian atau kejaksaan.

(5) Dalam hal penyidikan dilimpahkan kepada kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (4), kepolisian atau kejaksaan wajib melaksanakan koordinasi dan melaporkan perkembangan penyidikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

7. Pasal 50 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi:

(1) Dalam hal suatu tindak pidana korupsi terjadi dan Komisi Pemberantasan Korupsi belum melakukan penyidikan, sedangkan perkara tersebut telah dilakukan penyidikan oleh kepolisian atau kejaksaan, instansi tersebut wajib memberitahukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan.

(2) Penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan koordinasi secara terus menerus dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.

(3) Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mulai melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan.

(4) Dalam hal penyidikan dilakukan secara bersamaan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi, penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan tersebut segera dihentikan.

8. Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia:

"Jaksa Agung sebagai penyidik berwenang melakukan penangkapan untuk kepentingan penyidikan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat berdasarkan bukti permulaan yang cukup"

9. Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia:

"Jaksa Agung sebagai penyidik dan penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan "

10. Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia:

(1) *Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:*

d. *“melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu, berdasarkan undang-undang”.*

Yang dimaksud dengan redaksi kata “Pemeriksaan” dalam skripsi ini ialah sebuah proses yang dilakukan mulai dari menerima dan memeriksa berkas hingga melaksanakan penetapan hakim oleh Kejaksaan itu sendiri sesuai dengan pasal 14 KUHAP.⁴⁵

C. Kajian Pustaka

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, menurut Pasal 24 ayat 1 UUD 1945, ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan mengenai badan-badan lain tersebut dipertegas dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan mengenai badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman meliputi Kepolisian Negara RI, Kejaksaan RI, dan badan-badan lain yang diatur dengan undang-undang.

Selanjutnya, Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 2 menegaskan bahwa:

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana)

1. Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam undang-undang ini disebut Kejaksaan lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.
2. Kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara merdeka.
3. Kejaksaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah satu dan tidak terpisahkan.

Kerjasama antara Kejaksaan dengan instansi penegak hukum lainnya dimaksudkan untuk memperlancar upaya penegakan hukum sesuai dengan asas cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak dalam penyelesaian perkara. Menurut pasal 137 KUHAP dijelaskan bahwa tugas penuntutan merupakan tugas yang hanya dimiliki oleh jaksa penuntut umum kepada siapa dan terhadap jenis perkara pidana apapun.⁴⁶

Sebagai produk hukum yang disebut-sebut sebagai karya agung bangsa Indonesia, KUHAP memperkenalkan kerangka diferensiasi fungsional, dimana penyidik sepenuhnya diserahkan kepada kepolisian⁴⁷, sedangkan kejaksaan berfungsi hanya sebagai penuntut umum dan pelaksanaan penetapan hakim. Kejaksaan tidak mempunyai wewenang untuk

⁴⁶ **RM Suharto**, Penuntutan Dalam Praktek Peradilan, Sinar Grafika: Jakarta, 2004, hlm.20

⁴⁷ Pasal 1 angka 1 KUHAP : Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan

melakukan penyidikan, kecuali dalam hal sebagaimana diatur dalam ketentuan peralihan pasal 284 ayat (2) KUHAP. Mengingat KUHAP memandang penyidikan sebagai suatu fungsi yang berdiri sendiri, sehingga memisahkan fungsi penyidikan di Indonesia dari hakikat sejatinya, yaitu sebagai bagian yang tidak terpisahkan yang bertujuan, untuk mendukung keberhasilan dari penuntutan perkara pidana.

Disamping itu muncul tumpang tindih antar kewenangan penyidikan kepolisian yang berdasarkan KUHAP merupakan penyidikan untuk seluruh tindak pidana di Indonesia dengan kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh berbagai penyidik PNS. Menurut pasal 2 ayat (5) PP No.27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP, PPNS diangkat oleh Menteri Kehakiman dengan terlebih dahulu mendengar pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Dalam perkembangannya, fungsi penyidikan yang diemban oleh masing-masing penyidik PPNS tersebut berpotensi menimbulkan tumpang tindihnya penanganan sebuah perkara yang bersifat multidimensi, baik antara sesama penyidik PPNS.

Dilain pihak, kejaksaan sebagai pengemban fungsi penuntutan, tidak memiliki hubungan koordinasi langsung dengan penyidik PPNS mengingat menurut KUHAP kewajiban menyampaikan hasil penyidikan oleh PPNS kepada kejaksaan harus melalui penyidik Polri dan demikian pula sebaliknya penyampaian petunjuk dari kejaksaan kepada PPNS dilakukan melalui penyidik Polri. Kondisi tersebut menyebabkan lambat serta berbelit-

belitnya proses penanganan perkara yang dilakukan oleh penyidik PPNS jika dibandingkan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri⁴⁸.

Dari berbagai uraian diatas,maka jelaslah bahwa bangunan penegakan hukum yang memisahkan antara fungsi penyidikan dan penuntutan dirasakan tidak dapat lagi menunjang kebutuhan akan efektifitas penanganan perkara di dataran praktis. Mengingat sejatinya penyidikan merupakan fungsi penunjang untuk mempersiapkan penuntutan yang baik, maka peranan untuk mengkoordinasikan berbagai lembaga yang memiliki kewenangan penyidikan tersebut sudah seharusnya terlembaga pada kejaksaan sebagai pelaksana fungsi penuntutan. Dalam konteks tersebut,kejaksaan sebagai *dominus litis* dalam perkara pidana dapat secara efektif menilai mengenai ketentuan pidana mana yang akan digunakan dalam menangani sebuah perkara, termasuk lembaga mana yang paling tepat untuk melakukan penyidikan guna menunjang materi penuntutan yang sedang dipersiapkannya tersebut.

⁴⁸ **Maringka Jan.S**, Reformasi Kejaksaan Dalam Sistem Hukum Nasional, Sinar Grafika: Jakarta, 2017, hlm.44

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis & Lokasi Penelitian

Jenis Penelitian pada skripsi ini adalah penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif perlu menekankan pada pentingnya kedekatan dengan orang-orang dan situasi penelitian, agar peneliti memperoleh pemahaman jelas tentang realitas dan kondisi kehidupan nyata (Patton dalam Poerwandari, 1998). Penyusunan skripsi ini dimulai dengan penelitian awal dengan mengumpulkan berbagai data dan informasi yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Pada tahap lanjutan penulis melakukan penelitian di KEJAKSAAN NEGERI TAKALAR.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan kualitatif menekankan pada makna, penalaran, definisi suatu situasi tertentu (dalam konteks tertentu), lebih banyak meneliti hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Pendekatan kualitatif, lebih lanjut mementingkan proses dibandingkan dengan hasil akhir. Oleh karena itu, urutan-urutan kegiatan dapat berubah sewaktu-waktu tergantung pada kondisi dan banyaknya gejala-gejala yang ditemukan. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu secara holistik (utuh). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena penelitian ini menganalisis dan mendeskripsikan peran kejaksaan dalam penyidikan & penuntutan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Takalar (tahun

2014-2016) yang didapatkan dari kata-kata hasil wawancara dengan narasumber penelitian.

C. Sumber Data

Sumber data yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data ini dapat diperoleh melalui pengamatan langsung maupun hasil wawancara kepada informan berdasarkan pedoman wawancara yang dibuat oleh peneliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini didapat melalui peninggalan tertulis yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku literatur, dokumen, dan tulisan yang dianggap peneliti berkenan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

D. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode wawancara. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau informan dengan menggunakan alat yang dinamakan

interview guide (panduan wawancara) (Nazir,1999). Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dilakukan secara sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan mewawancarai Kasi Pidsus KEJARI Takalar dan Staff Pidsus Kejari. Wawancara juga dilakukan untuk mengetahui sejauh mana peran Kejari Takalar dalam Penyidikan & Penuntutan yang telah dilakukan

E. Instrumen Penelitian

Pada penelitian kualitatif, instrumen penelitian adalah: peneliti itu sendiri sehingga validasi dilakukan oleh peneliti sendiri dengan memperhatikan hal-hal diantaranya:

- a) Pemahaman peneliti terhadap metode penelitian kualitatif.
- b) Penguasaan wawasan peneliti terhadap bidang yang diteliti.
- c) Kesiapan peneliti untuk memasuki obyek penelitian secara akademik maupun logistik.

Instrumen penelitian pada penelitian kualitatif, permasalahan di awal penelitian belum jelas dan pasti, maka instrumen yang paling tepat adalah peneliti itu sendiri. Setelah masalah sudah mulai jelas, maka dapat dikembangkan sebagai instrumen yang sederhana yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang ditemukan melalui observasi dan wawancara.

F. Teknik Pengolahan dan Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan kelengkapan informasi yang sesuai dengan fokus penelitian maka yang dijadikan teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari informan penelitian, berupa hasil wawancara, data primer akan menjadi sumber data utama dalam penelitian. Dalam mendapatkan data primer, dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut

- a) Wawancara; Teknik pengumpulan data melalui tanya jawab langsung dengan informan untuk mendapatkan informasi-informasi tambahan yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b) Observasi; Mengamati secara langsung-tanpa mediator-sesuatu objek untuk melihat dengan dekat kegiatan yang dilakukan objek tersebut. Kegiatan observasi meliputi melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, obyek-obyek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan.

c) Dokumentasi; Mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis dengan cara membaca *literature*, tulisan, maupun dokumen yang dianggap peneliti berkenan dengan penelitian yang sedang diteliti.

2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang mendukung data primer. Data yang ditambahkan atau pelengkap yang bisa didapat dari studi pustaka dan literatur- literatur yang berkaitan dengan penelitian.



BAB IV

Landasan Hukum dan Efektivitas Kejaksaan Negeri Takalar Dalam Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi

A. Aturan Hukum Tentang Peran Kejaksaan Dalam Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi

Kejaksaan RI, seperti halnya dengan alat-alat negara lainnya adalah alat revolusi untuk melaksanakan pembangunan nasional semesta yang berencana menuju tercapainya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila atau masyarakat Sosialis Indonesia yang memenuhi amanat penderitaan rakyat, karena negara Republik Indonesia adalah negara Hukum, segala tindakan yang dilakukan oleh Kejaksaan untuk menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum Negara. Dalam perkembangan selanjutnya setelah diundangkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia, maka Kejaksaan keluar dari Departemen Kehakiman Republik Indonesia dan berdiri sendiri sampai sekarang. Tiga Lembaga penegak hukum yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung dan POLRI sepakat saling mendukung dalam upaya pemberantasan korupsi. 3 lembaga hukum itu juga telah menandatangani nota kesepahaman bersama (MoU)

atau *Memorandum of Understanding* untuk memperkuat fungsi koordinasi antar lembaga penegak hukum dalam penanganan korupsi⁴⁹

Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 2 menegaskan bahwa:

- (1) Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam undang-undang ini disebut Kejaksaan lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.
- (2) Kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara merdeka.
- (3) Kejaksaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah satu dan tidak terpisahkan.

Mencermati isi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 diatas, dapat diidentifikasi beberapa hal, yaitu:

1. Kejaksaan sebagai suatu lembaga pemerintahan;
2. Kejaksaan melakukan kekuasaan (kewenangan) di bidang penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang;
3. Kekuasaan (kewenangan) itu dilakukan secara merdeka;
4. Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan.

⁴⁹ <http://m.detik.com/news/berita/1864554/3-lembaga-penegak-hukum-koordinasi-bagi-tugas-penanganan-korupsi>, diakses pada tanggal 23 Maret 2018 pukul 03:49 Wita.

Komperasi pengaturan mengenai tugas dan wewenang Kejaksaan RI secara normatif dapat dilihat dalam beberapa ketentuan Undang-Undang mengenai Kejaksaan, sebagaimana yang hendak diketengahkan di bawah ini tentang landasan hukum akan sebuah kewenangan kejaksaan dalam proses penyidikan. Ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 30 ayat 1 huruf (d) yaitu:

(1) Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Melakukan penuntutan;
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang;
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

B. Optimalisasi Peran Kejaksaan Negeri Takalar Dalam Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi

Indonesia sebagai negara hukum, merupakan suatu konsekuensi logis diperlukannya suatu institusi yang mampu mengawal penegakan hukum. Tidak hanya mampu, dalam pelaksanaan tugas tetapi juga

mampu melaksanakan kewenangannya. Kejaksaan juga sangat diharapkan dalam tiap penanganan kasus tindak pidana yang khusus sesuai dengan tupoksi agar dapat terselesaikan secara optimal.

Untuk mengetahui sejauh mana optimalisasi peran penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi, maka pertama-tama harus dapat mengukur kinerja penyidik Kejaksaan. Pertama-tama penulis akan memaparkan kondisi objektif di lapangan untuk melihat sejauh mana optimalisasi peran penyidik kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi, Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, mengingat akan mengidentifikasi dan menganalisa penerapan ketentuan-ketentuan hukum terkait dengan kendala Kejaksaan di dalam melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu mengkaji dan menganalisa aspek hukum dengan memperhatikan kenyataan yang terjadi di lapangan, mengingat akan menganalisa pemberlakuan hukum yang berlaku dalam suatu lembaga/instansi. Jenis data primer adalah jenis penelitian tentang data yang di kumpulkan sendiri oleh peneliti di lapangan yakni berkaitan dengan kendala Kejaksaan di dalam melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi mengenai data jumlah perkara tindak pidana korupsi yang masuk di Kejaksaan Negeri Takalar dan kendala dalam melakukan penyidikan. Jenis data sekunder adalah jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti mengenai peraturan-peraturan yang terkait dengan masalah yaitu :

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP); Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan; Buku- buku, jurnal, makalah, internet serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan.

Sebelum sebuah perkara Tindak Pidana Korupsi dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, di dalam penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan Negeri Takalar, maka terlebih dahulu akan dilakukan tahap penyelidikan, tahap penyidikan, dan tahap penuntutan. Hal ini tentu saja tidak bisa dipisahkan dari tahapan-tahapan penanganan perkara, sebagaimana diatur di dalam ketentuan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PERJA-039/A/JA/10/2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus.⁵⁰

Sumber penyidikan tindak pidana korupsi :⁵¹

- 1) Adanya laporan atau pengaduan dari masyarakat;

⁵⁰ Wawancara dengan Zen Hadiano, S.H.,M.H, selaku Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Takalar, diolah 17 november 2017

⁵¹ Wawancara dengan Hermansyah, S.H , selaku Staff Pidsus Kejaksaan Negeri Takalar, diolah 17 november 2017

- 2) Pelimpahan instansi auditor BPK/BPKP/Inspektorat;
- 3) Berdasarkan temuan dilapangan

Untuk laporan yang masuk di Kejaksaan Negeri Takalar, itu tidak langsung masuk di Bidang Pidana Khusus, ada bidang lain yang sesuai disposisi sampai menerima dan menindak lanjuti laporan tersebut, yakni Bidang Intel. Adapun laporan yang masuk di bidang pidsus Kejari Takalar tahun 2014 – 2016, yakni :

Tabel 1

Data Laporan Dugaan Tindak Pidana Korupsi PIDSUS Kejari Takalar
Tahun 2014 - 2016

NO	PELAPOR	TAHUN PELAPORAN	KASUS POSISI SINGKAT	KETERA- NGAN
1.	LSM	2014	dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Penyimpangan sisa Kas Sekretariat DPRD Kab. Takalar Tahun Anggaran	Inkracht

			2007-2008.	
2.	LSM	2014	dugaan Tindak Pidana Korupsi mengenai dana Askes, Jamkesmas dan Jampersal pada Dinas Kesehatan Kab. Takalar T.A. 2012.	Dihentikan pada tahap penyelidikan-an karena sudah ada pengembalian kerugian negara
3.	LSM	2014	dugaan Tindak Pidana Korupsi mengenai dana Askes, Jamkesmas dan Jampersal pada RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle Pemerintah Kab. Takalar T.A. 2012.	Dihentikan pada tahap penyelidikan-an karena sudah ada pengembalian kerugian negara
4.	Masyarakat	2014	Dugaan Penyimpangan biaya pemeliharaan kantor yang terdiridari pengadaan lampu jalan, kendaraan dinas, dan anggaran	Dihentikan karena tidak cukup bukti

			umum lainnya pada Pemda Takalar T.A. 2013.	
5.	LSM	2014	Dugaan Penyimpangan biaya pemeliharaan kantor yang terdiri dari pengadaan Software (Aplikasi) Pemuktahiran Data Pemilih pada KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kab. Takalar Tahun 2012.	Dihentikan karena tidak cukup bukti
6.	LSM	2014	dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Takalar T. A. 2012 - 2013.	Dihentikan pada tahap penyelidikan-an karena sudah ada pengembal-ian kerugian negara

7.	LSM	2014	dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Penyertaan modal Pemkab. Takalar pada Perusahaan Daerah Umum dan Jasa Usaha Konstruksi (PUJK) Perusahaan Daerah Agribisnis, PT. BPR Surya Sejati Palleko, PT. BPR Gerbang Masa Depan Galesong Tahun 2012.	Dihentikan pada tahap penyelidik -an karena sudah ada pengembal -ian kerugian negara
8.	Masyarakat	2014	Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Rehabilitasi Sekolah yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan T.A. 2013 pada Kab. Takalar	Dihentikan pada tahap penyelidik -an karena sudah ada pengembal -ian kerugian negara
9.	LSM	2015	Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Penyertaan Modal Pemkab. Takalar	Dihentikan karena tidak cukup bukti

			Tahun Anggaran 2011-2012.	
10.	LSM	2015	Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Lanjutan Pembangunan PPI BEBA Kab. Takalar T.A. 2014.	Dihentikan pada tahap penyelidikan-an karena sudah ada pengembalian kerugian negara
11.	LSM	2015	Dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan pembangunan pantai lamangkia, kecamatan mangarabomban, kabupaten takalar. Tahun anggaran 2014.	Upaya Hukum Kasasi

12.	LSM	2015	Dugaan tindak pidana korupsi pada pembangunan docking / slipway pada dinas perikanan dan kelautan kabupaten takalar tahun anggaran 2014.	Upaya Hukum Banding
13.	LSM	2016	Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan proyek pemecah ombak dengan program pengembangan Infrastruktur Pedesaan (PIIP) Tahun Anggaran 2013.	Dihentikan karena tidak cukup bukti
14.	Masyarakat	2016	Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada bantuan hibah barang pada Dinas Pertanian Kab. Takalar Tahun 2013 dan 2014.	Dihentikan pada tahap penyelidikan-an karena sudah ada pengembalian kerugian negara


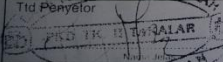
15.	LSM	2016	Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Penggunaan dan pertanggung jawaban perjalanan dinas dan bimbingan teknis anggota DPRD Kabupaten Takalar pada Sekretaris DPRD Kab. Takalar T.A. 2014 yang diduga fiktif.	Dihentikan pada tahap penyelidik -an karena sudah ada pengembal -ian kerugian negara
16.	Masyarakat	2016	Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Penggunaan Dana ADD / DD pada Desa Bontoloe Kecamatan Galesong Kab. Takalar Tahun Anggaran 2015.	Tahap Penuntutan
17.	LSM	2016	Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Evaluasi Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Takalar dan Kegiatan Penyusunan Rencana	Dihentikan pada tahap penyelidik -an karena sudah ada pengembal -ian kerugian negara

			Detail Tata Ruang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar pada BAPPEDA Kab. Takalar.	
18.	LSM	2016	dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan jasa penilaian/appraisal barang milik daerah (bmd) kabupaten takalar tahun 2015 dan kegiatan penyusunan perbup tentang pedoman kapitalisasi dan penyusunan aset tetap milik pemerintah dan kegiatan penyusunan perbup tentang sistem dan prosedur pengelolaan barang habis pakai/persediaan pada bpkd kab. takalar.	Dihentikan pada tahap penyelidikan-an karena sudah ada pengembalian kerugian negara

Proses pemeriksaan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan SOP (Standar Operasional Prosedur) Kejaksaan yang mana melalui tahapan-tahapan yakni penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, untuk pemeriksaan dilakukan di kantor Kejaksaan Negeri Takalar dengan cara memanggil pihak-pihak yang diminta keterangan.

Tabel 2

Bukti Slip Pengembalian Kerugian Negara

 Sulselbar		PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULSEL BAR											
Validasi 021 001 000000047 KASDA 18/11/14 11.32 31 0200 0000 00105 001 2793 000 000 100 000		18 NOV 2014 Checker *) Diisi Oleh Bank Tanggal Paraf (.....)											
Setoran Untuk : <input type="checkbox"/> Simpeda <input type="checkbox"/> Tapenda <input type="checkbox"/> Tab. Haji <input type="checkbox"/> Giro <input type="checkbox"/> Pinjaman <input type="checkbox"/> Deposito <input type="checkbox"/> Lainnya <input type="checkbox"/>		Tanggal Setoran/Pembukuan *) Diisi Oleh Bank No. Rekening : 0 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 Nama Pemilik Rek : KASDA Kode Cab. Tujuan : 0 2 1 - Cabang											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>No. Dokumen</th> <th>Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rp.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Komis *) Diisi oleh Bank</td> <td>Rp. 7,293,000.00</td> </tr> <tr> <td>Biaya *) Diisi oleh Bank</td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>Rp. 7,293,000.00</td> </tr> </tbody> </table>		No. Dokumen	Jumlah	Rp.		Komis *) Diisi oleh Bank	Rp. 7,293,000.00	Biaya *) Diisi oleh Bank	Rp.	TOTAL	Rp. 7,293,000.00	Nama Penyeter : Hj. Alwiyah S.pd No. Telp. Penyeter : Alamat/No. Identitas : Sumber Dana : Kepala SMK Neg 2 Takalar Berita/Keterangan : Setoran pengembalian dana rehab smk 2 Takalar	
No. Dokumen	Jumlah												
Rp.													
Komis *) Diisi oleh Bank	Rp. 7,293,000.00												
Biaya *) Diisi oleh Bank	Rp.												
TOTAL	Rp. 7,293,000.00												
Terbilang : Tujuh juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah.		Penyetor telah membaca dan setuju untuk tunduk pada ketentuan dan syarat umum yang tertera dibalik slip ini											
Ttd Penyeter  KEPALA SMK NEG 2 TAKALAR SULAWESI SELATAN		Ttd Teller (.....) Nama Jelas											
		Pgs Approve (.....) Nama Jelas											

Dokumen No. * Diisi Oleh Bank Rp. 120.000.000 TOTAL Rp. 120.000.000 Silang <i>SHAWAN AL WILLY</i> <i>ADG VP</i>		Nama Penilik Rek : <i>XXX XXX XXX</i> Kode Cak Tujuan <i>0111</i> - Cabang <i>MAN</i> Nama Penyitor <i>XXX XXX XXX</i> No. Telp. Penyitor <i>XXXXXXXXXXXX</i> Alamat/No. Identitas <i>XXXXXXXXXXXX</i> Sumber Dana <i>123456789</i> Berita/Keterangan :	
Penyitor telah mencairkan atau setorkan seluruh jumlah yang telah masuk atas nama <i>XXX XXX XXX</i> ke rekening <i>XXX XXX XXX</i> pada tanggal <i>12/12/2013</i> dan telah ditandatangani oleh <i>XXX XXX XXX</i> dan <i>XXX XXX XXX</i> .		Ttd. Teller <i>XXX XXX XXX</i> Pils Approve <i>XXX XXX XXX</i>	
Bank Sulsel SLIP SETORAN PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN			
Setoran Untuk <input type="checkbox"/> Simpeda <input type="checkbox"/> Tapemada <input type="checkbox"/> Tab. Haji <input checked="" type="checkbox"/> Giro <input type="checkbox"/> Deposito <input type="checkbox"/> Tabungan <input type="checkbox"/> Tabung		Tanggal Setoran/Pembayaran * Diisi oleh Bank <i>12/12/2013</i>	
No. <i>XXXXXXXXXX</i> Rp. 120.000.000 Rp. 120.000.000 TOTAL Rp. 120.000.000 Silang <i>SHAWAN AL WILLY</i> <i>ADG VP</i>		No. Rekening <i>1111111111111111</i> Nama Pemilik Rek <i>XXX XXX XXX</i> Kode Cak. Tujuan <i>0111</i> - Cabang <i>MAN</i> Nama Penyitor <i>XXX XXX XXX</i> No. Telp. Penyitor <i>XXXXXXXXXXXX</i> Alamat/No. Identitas <i>XXXXXXXXXXXX</i> Sumber Dana <i>123456789</i> Berita/Keterangan :	
Penyitor setoran merupakan atau setorkan seluruh jumlah yang telah masuk atas nama <i>XXX XXX XXX</i> ke rekening <i>XXX XXX XXX</i> pada tanggal <i>12/12/2013</i> dan telah ditandatangani oleh <i>XXX XXX XXX</i> dan <i>XXX XXX XXX</i> .		Ttd. Teller <i>XXX XXX XXX</i> Pils Approve <i>XXX XXX XXX</i>	

Salah satu pakar hukum acara pidana dari Universitas Indonesia Teuku Nasrullah berpendapat soal waktu pengembalian hasil tindak pidana.

⁵² Wawancara dengan Zen Hadiano, S.H.,M.H, selaku Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Takalar, diolah 17 november 2017

Khusus dalam konteks tindak pidana korupsi, pengembalian kerugian negara sebelum penyidikan bisa menghapus tindak pidana. Salah satu unsur korupsi, lanjutnya adalah unsur kerugian negara. Bila sudah dikembalikan berarti unsur tersebut sudah hilang. Tapi syaratnya harus sebelum ada penyidikan. Jika penyidikan telah dimulai, ia menilai pengembalian uang hanya mengurangi sanksi pidana saja. Alasannya, pengembalian kerugian negara dianggap sebagai timbal balik karena telah meringankan tugas negara. Tidak mempersulit dari segi biaya, waktu, tenaga dan pikiran negara. Pengembalian yang juga dianggap sebagai pengakuan bersalah si terdakwa.⁵³

Tim penyidikan ditunjuk atas dasar Surat Perintah Penyidikan yang diterbitkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri atau pejabat teknis setingkat dibawahnya atas nama dan sepengetahuan Kepala Kejaksaan Negeri dengan mengutamakan Jaksa yang tergabung dalam tim penyelidikan. Tim penyidikan sekurang-kurangnya terdiri dari Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus selaku koordinator tim merangkap anggota tim dan tiga orang Jaksa selaku anggota tim.

Setelah dimulainya penyidikan, penyidik harus memberitahukan telah dimulainya penyidikan kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan

⁵³ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt56984acfc89f3/apakah-kasus-korupsi-dihentikan-bila-terdakwa-mengembalikan-kerugian-negara>, diakses pada tanggal 11 Maret 2018 pukul 02:08 Wita

Negeri Takalar. Demikian juga hal tersebut harus dilakukan penyidik dari Kejaksaan, dalam hal ini penyidik tetap harus menyampaikan SPDP tersebut ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Takalar melalui nota dinas. Setelah penerimaan SPDP, maka Kepala Kejaksaan Negeri Takalar menerbitkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara pidana atau biasa disebut P-16 kemudian diikuti dengan surat perintah penunjukan petugas pelaksana administrasi penanganan perkara tindak pidana.

Maksud penerimaan berkas perkara tahap I adalah penerimaan berkas perkara hasil penyidikan dari penyidik, jadi berkas perkara tersebut dikirim oleh penyidik apabila penyidikan yang telah dilakukan dinyatakan telah selesai. Dari ketentuan pasal diatas disebutkan bahwa penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan kepada penuntut umum. Setelah pemberkasan yang dilakukan penyidik selesai maka penyidik mengirimkan berkas perkara tersebut kepada Kejaksaan Negeri Takalar. Setelah menerima berkas perkara dari Penyidik, Jaksa Penuntut umum wajib segera mempelajari dan meneliti berkas perkara yang telah diserahkan oleh penyidik. Jaksa Penuntut Umum meneliti kelengkapan secara formil maupun materiil berkas perkara penyidikan dilakukan paling lama 14 hari. Dalam waktu 7 (tujuh) hari Jaksa Penuntut Umum harus menentukan apakah berkas perkara tersebut sudah lengkap atau belum lengkap. Apabila penuntut umum berpendapat kelengkapan formil/materiil berkasnya belum lengkap maka

penuntut umum menerbitkan P-18 (pemberitahuan hasil penyidikan belum lengkap) dan mengembalikan berkas perkara kepada penyidik. Penerbitan P-18 juga disertai dengan petunjuk-petunjuk untuk dilengkapi oleh Penyidik yang biasa disebut dengan P-19.

Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum. Dalam waktu 14 (empat belas) hari penyidik harus menyelesaikan penyidikan tambahan itu sesuai dengan petunjuk-petunjuk penuntut umum. Apabila berkas perkara telah lengkap secara formil maupun materiil maka Jaksa Penuntut Umum menerbitkan P-21 dan harus segera membuat surat dakwaan. Jangka waktu penyidikan dibatasi selama 4 (empat) bulan, namun dalam prakteknya berlarut-larut bahkan sampai 1 (satu) tahun dan bahkan lebih. Dalam waktu 4 (empat) bulan itu, penyidikan selesai atau belum selesai akan diadakan ekspose di Kejaksaan Tinggi SULSELBAR. Jika belum selesai dalam waktu yang ditentukan, maka setiap 30 hari akan terus dimintakan laporan perkembangan penyidikan.

Tabel 3

Daftar Nama Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Takalar

NO	NAMA
----	------

1.	ZEN HADIANTO, S.H.,M.H
2.	RIDWAN, S.H
3.	ASRINI AS'AD, S.H

Dari data tabel 3 di atas dapat dilihat bahwa jumlah penyidik di Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Takalar sangat kurang dan tidak sebanding dengan jumlah laporan yang masuk. Dengan jumlah Penyidik yang ada saat ini belum memadai untuk menangani kasus dengan jumlah yang besar, hal ini membuat banyak laporan yang proses penyelesaiannya terkatung-katung tanpa kejelasan. Namun ada juga laporan yang waktu penyelesaiannya memang memerlukan waktu yang lama dengan berbagai alasan masing-masing tiap kasusnya. Dengan demikian, melihat dari banyaknya kasus serta kondisi ketersediaan jumlah penyidik yang ada saat ini di Bidang Pidana Khusus, Optimalisasi peran penyidik jaksa di Kejaksaan Negeri Takalar masih sangat rendah yang di pengaruhi oleh beberapa faktor. Dalam upaya penyelesaian tindak pidana korupsi di daerah, Kejaksaan seringkali menghadapi hambatan baik dari dalam maupun luar Kejaksaan. Hambatan tersebut ada seiring dengan situasi

dan kondisi Kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di masing-masing daerah.

C. Analisis

Dalam proses penyidikan perkara pidana khusus terdapat beberapa permasalahan-permasalahan yang menjadi kendala penyidik untuk meningkatkan profesionalisme dalam melakukan penyidikan. Dalam mewujudkan penegakan hukum akan keadilan diperlukan satu mata rantai proses yang baik dan sistematis. Demi terwujudnya penegakan hukum yang baik diperlukan juga hubungan koordinasi yang baik antar aparat penegak hukum dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Secara umum hambatan yang timbul dalam upaya penyelesaian tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Takalar meliputi tiga pokok hambatan, yaitu:

1. Hambatan keterbatasan jumlah sumber daya manusia pada Jaksa Penyelidik, Jaksa Penyidik, dan Jaksa Penuntut Umum.
2. Hambatan keterbatasan sumber dana/anggaran penanganan perkara dalam kegiatan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.
3. Hambatan keterbatasan fasilitas/sarana dan prasarana yang mendukung dan menunjang kegiatan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

Bahwa jumlah sumber daya manusia untuk tenaga penyelidik, penyidik, dan penuntut umum tindak pidana korupsi pada Seksi Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri Takalar hanya ada tiga orang. Jumlah tersebut dirasakan masih kurang sebanding dengan banyaknya kasus tindak pidana korupsi yang ditangani/diselesaikan. Untuk mengatasi hal tersebut telah diambil langkah kebijakan dengan mengoptimalkan fungsi tenaga yang ada dan dibantu penyelidik, penyidik, dan penuntut umum pada bidang lain yaitu satu orang dari Sub Bagian Pembinaan, dua orang dari Seksi Intelijen, dan tiga orang dari Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara atas perintah Kepala Kejaksaan Negeri Takalar, sehingga upaya untuk percepatan penanganan perkara tindak pidana korupsi dapat berjalan menurut system dan prosedur yang berlaku.⁵⁴

Penanganan perkara tindak pidana korupsi adalah termasuk perkara yang sulit pembuktiannya sehingga dalam penanganan seringkali Penyidik dituntut untuk melakukan kegiatan pro yustisi/pengumpulan alat bukti lebih dibanding penanganan tindak pidana biasa, dalam hal ini diantaranya adalah:

1. Saksi tidak kooperatif dalam kesediaan hadir meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, serta memberikan keterangan berbelit-belit.

⁵⁴ Wawancara dengan Zen Hadiano, S.H.,M.H, selaku Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Takalar, diolah 17 november 2017

2. Mencari saksi ahli dimana seringkali ahli yang dibutuhkan dalam satu kegiatan penyidikan lebih dari satu orang ahli dan perlu untuk diketahui terkadang untuk ahli yang berkualitas seringkali membutuhkan biaya lebih sedangkan hal ini penting sekali mengingat kebanyakan tersangka/terdakwa perkara korupsi adalah orang-orang berduit yang jelas-jelas mampu untuk membayar ahli-ahli berkualitas guna mementahkan sangkaan/dakwaan.
3. Kebutuhan Jaksa Penyidik untuk mendapatkan alat bukti tidak jarang menuntut Jaksa Penyidik untuk melakukan perjalanan ke luar kota bahkan luar propinsi yang dengan sendirinya menuntut pembiayaan lebih dari biaya yang sudah ada saat ini.⁵⁵

Terdapat kendala dalam melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi, terbagi menjadi dua (dua), yaitu secara teknis dan non teknis. Secara teknis, kendalanya :

1. Terbatasnya jumlah personil Penyidik
2. Saksi tidak berdomisili. Sering ditemui bahwa saksi yang akan dimintai keterangan oleh Penyidik, ternyata tidak berada ditempat dan berpindah tempat tinggal yang tidak diketahui keberadaannya. Sehingga mengurangi kapasitas pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi.

⁵⁵ Wawancara dengan Dwinanto Agung W, S.H.,M.H, selaku Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Takalar, diolah 5 Agustus 2017

3. Perhitungan auditor dari BPK/BPKP. Pihak kejaksaan meminta bantuan penghitungan uang negara yang dirugikan ke BPK/BPKP. Penghitungan ini juga terbilang lama karena pihak BPK/BPKP juga membutuhkan dokumen-dokumen dari instansi terkait yang melakukan tindak pidana korupsi. Pihak dari BPK/BPKP sendiri juga kesulitan jika dokumen yang dicari ternyata dihilangkan oleh tersangka.
4. Kurangnya partisipasi saksi dalam memberikan keterangan dalam proses penyidikan menyangkut atasan/majikan. Jika tersangka yang melakukan tindak pidana korupsi ini adalah atasannya, dalam hal ini kepala pimpinan suatu instansi/pemerintah, hal ini juga menjadi kendala dalam penyidikan dikarenakan saksi adalah bawahannya. Sering ditemui bahwa saksi tidak memberikan keterangannya secara menyeluruh atau jelas, sehingga menimbulkan keterangan yang tidak utuh.
5. Minimnya Anggaran Penanganan kasus di Bidang Pidana Khusus Kejari Takalar
6. Belum Memadainya Sarana & Prasarana untuk menunjang kinerja Penyidik

Hambatan secara non teknis :

1. Dokumen yang dicari hilang. Sebelum tersangka diperiksa atau digeledah, biasa tersangka akan mengilangkan dokumen-dokumen yang sudah lama. Sehingga biasanya dokumen ini tidak bisa di ungkap lagi.

Dalam hal hambatan yang timbul pada saat dilakukan upaya koordinasi dengan instansi lain yang berkaitan dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi tahap penyidikan sebagaimana disampaikan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus: Hambatan dalam proses penyidikan perkara tindak pidana korupsi yang memiliki nilai kerugian keuangan Negara sehingga pihak Jaksa Penyidik memerlukan bantuan audit perhitungan nilai kerugian keuangan Negara yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi tersebut dan memerlukan bantuan dari instansi lain seperti BPK maupun BPKP. Yang dalam hal ini tentunya melalui proses mulai dari mengajukan permohonan bantuan perhitungan kerugian keuangan Negara kepada BPK atau BPKP, jawaban atas permohonan bantuan tersebut, pemaparan perkara/gelar perkara, hingga diterbitkan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan Negara dari perkara tindak pidana korupsi tersebut, hal ini memerlukan waktu yang sangat lama hingga lebih dari dua bulan, sehingga dalam proses penyidikan perkara tindak pidana korupsi tersebut terkesan berlarut-larut.⁵⁶

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis, kendala yang paling berpengaruh dalam penyidikan ialah mengenai anggaran dalam setiap perkara yang tidak cukup untuk menangani kasus yang lain nya dan juga ditemui pada saat melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Takalar adalah kendala teknis. Kendala teknis itu yang mana adalah perhitungan auditor dari BPK/BPKP. Pihak dari Kejaksaan Negeri Takalar meminta bantuan

⁵⁶ Wawancara dengan Zen Hadiano, S.H.,M.H, selaku Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Takalar, diolah 17 november 2017

dari BPK/BPKP untuk penghitungan kerugian uang negara. Hal ini dilakukan oleh pihak Kejaksaan Negeri Takalar agar data kerugian uang negara lebih akurat. Penghitungan auditor ini menjadi kendala dalam tahap penyidikan perkara tindak pidana korupsi yang mana seringkali ditemui dari pihak BPK/BPKP meminta tambahan data untuk melengkapi rincian keuangan. Dari pihak Kejaksaan Negeri Takalar segera meminta dan mencari data yang berhubungan dengan audit keuangan suatu instansi (kalau yang diperiksa sebuah instansi pemerintahan). Hal ini dilakukan guna membuat akurat data auditor keuangan dari sebuah instansi yang telah merugikan keuangan negara. Dari bolak-baliknya meminta data tersebut membuat penghitungan auditor ini menjadi lama, ditambah lagi BPK/BPKP berlokasi di Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan yaitu di Makassar. Penghitungan auditor ini selesai lebih dari 4 (empat) bulan yang mana hal ini melebihi jangka waktu penyidikan perkara tindak pidana korupsi. Kejaksaan Negeri Takalar telah berupaya dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi agar di selesaikan secepatnya, upaya yang telah dilakukan adalah meminta perkembangan dari hasil penghitungan auditor dan mendesak BPK/BPKP agar diselesaikan secepatnya

BAB V

PENUTUP

A. *Kesimpulan*

Berdasarkan uraian pembahasan diatas maka kesimpulan penulis dalam skripsi ini adalah mengenai pengaturan tugas dan kewenangan Kejaksaan RI secara normatif dapat dilihat dalam beberapa ketentuan Undang-Undang mengenai Kejaksaan, sebagaimana yang hendak diketengahkan di bawah ini tentang landasan hukum akan sebuah kewenangan kejaksaan dalam proses penyidikan. Ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 30 ayat 1 huruf (d) yaitu: “Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang”.

Mengenai peran penyidik Jaksa dalam penyidikan tindak pidana khusus. Dari pembahasan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa kinerja jaksa penyidik hingga jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Takalar telah dijalankan sesuai dengan tugas dan kewenangannya, walau masih ada kasus yang proses penyidikannya memakan waktu lama dan berlarut-larut, dikarenakan proses pengauditan dari instansi yang bertugas mengaudit pun lama dikarenakan banyaknya permintaan dari daerah lain se-sulawesi selatan juga yang ingin mengaudit keuangan demi proses penegakan hukum.

B. *Implikasi Penelitian*

Sebagai suatu penelitian yang telah dilakukan dilingkungan Kejaksaan maka kesimpulan yang ditarik tentu mempunyai implikasi dalam bidang hukum dan juga penelitian-penelitian selanjutnya, sehubungan dengan hal tersebut maka implikasinya adalah sebagai berikut :

Hasil penelitian mengenai Landasan Hukum mengenai aturan tentang penyidik belum mempunyai sebuah arti secara eksplisit dalam KUHAP pasal 6 huruf (b) dikarenakan adanya satu pengartian yang tidak jelas mengenai lembaga apa saja yang dimaksud dari pejabat Pegawai Negeri Sipil atau yang sekarang di sebut Aparatur Sipil Negara tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, sehingga hanya lembaga Polri yang jelas dalam KUHAP tersebut mengenai Penyidik yang termaktub dalam pasal 6, sehingga menimbulkan multitafsir.

Berdasarkan hasil penelitian di Kejaksaan Negeri Takalar, Peran akan Tugas dan kewenangan telah dijalankan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), tetapi tak jarang juga tidak sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan dimana dalam penerbitan P-18 (pemberitahuan hasil penyidikan belum lengkap) ada batas waktu yang mesti di tepati untuk ditindak lanjuti tetapi yang menjadi kendala ialah adanya hambatan dalam proses pengauditan dari BPK/ BPKP untuk pemenuhan bukti dari data-data tersebut untuk dilengkapi. Selain itu anggaran, sarana dan prasarana serta Kurangnya personil penyidik pun

sangat mempengaruhi perkembangan dari setiap langkah penegakan hukum yang dilakukan.

C. *Saran*

Berdasarkan kesimpulan & implikasi diatas maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya perubahan redaksi kata dalam KUHAP pasal 6 yang menjadi multafsir terhadap kata “penyidik” atau mesti mengadakan penjelasan yang konkrit dan eksplisit tentang redaksi kata tersebut.
2. Untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Takalar dalam tahap penyidikan dan terlebih dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi di daerah perlu adanya perhatian khusus pemerintah pusat melalui Kejaksaan Agung Republik Indonesia, untuk penambahan jumlah personil Jaksa Penyelidik, Jaksa Penyidik, dan Jaksa Penuntut Umum, ataupun saran dari penulis yang lebih penting yakni pengadaan profesi Jaksa baru yang berwenang dalam hal mengaudit (sertifikasi auditor), sehingga memiliki keahlian khusus meng-audit keuangan tanpa lama menunggu hasil audit lembaga lain demi efisiensi tenaga dan waktu ke proses penegakan hukum selanjutnya. tersedianya sumber dana/anggaran dan fasilitas sarana/prasarana yang mendukung serta menunjang kegiatan penyidikan sesuai

standar yang ditentukan bagi Kejaksaan Negeri Tipe B dengan memperhatikan situasi dan kondisi wilayah hukumnya.

3. Membangun Jaringan Konektifitas Antar Lembaga Penegak Hukum Lainnya, serta diperlukan juga peran masyarakat dalam mengawasi dan melaporkan dugaan tindak pidana khusus tersebut di aparat yang berwenang.



DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah,1995. Delik-delik Terbesar di Luar KUHP dengan Komentari.Jakarta: Pradnya Paramita.

Hassan Shadily.1983.Ichtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta: Ensiklopedia Indonesia.

Sahuri Lasmadi.Dosen S1,S2,S3 Fakultas Hukum Universitas Jambi.
pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia, Mahkamah Agung RI: tanpa tahun.

Jurnal Ilmu Hukum. 2015. Volume 6,Nomor 2.

Wasito Wojo. 2001. Kamus Besar Bahasa Indonesia.Jogjakarta: Balai Pustaka.

Andrea Fockema. 1983. Kamus Hukum.Bandung: Bina cipta.

Koeswadji Hermien Hadiati. 1994. Korupsi di Indonesia dari Delik Jabatan ke Tindak Pidana Korupsi. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Sudarto.1996.Hukum dan Hukum Pidana.Bandung:Cetakan keempat.

Rohim.2008.Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi.Depok:Pena Multi Media.

Kristian & Yopi Gunawan. 2015. Tindak Pidana Korupsi Kajian terhadap harmonisasi antara hukum nasional dan the united nations convention against corruption (UNCAC),Bandung: PT refika aditama.

Blau Adrian. 2009. Hobbes on Corruption, UK, University of Manchester Publisher.

Lopa Baharuddin. 2002. Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum. Kompas.

analisa lebih detail sebagaimana dipaparkan oleh badan pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKB) yang berjudul “Strategi Pemberantasan Korupsi”.

Prakoso Djoko. 1988. Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana. Yogyakarta: Liberty.

Effendi, Marwan. 2005. Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Shihab Muhammad Quraish. 2007. Tafsir Al Misbah. Jilid II. cet. IX; Jakarta: lentera Hati.

Hamka. 1983. Tafsir Al Azhar, Juz 4, 5, 6. Jakarta: Panjmas.

Imam Koeswahyono dkk, 2014. Sosio Legal Bekal Pengantar dan Substansi Pendalaman. Malang: Intimedia.

RM Suharto. 2004. Penuntutan Dalam Praktek Peradilan. Jakarta: Sinar Grafika.

Al-Quran & Terjemahan

Perundang-Undangan

- KUHP

- KUHAP
- UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
- Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Referensi Internet

<http://www.wordcentral.com/cgi-bin/student?book=student&va=corrupt> diakses pada tanggal 10 september 2017 pada pukul 15:27 Wita

<http://www.hukumonline.com//0210/05/utama/mund01.htm>>, diakses tanggal 22 september 2017 pukul 15:36 Wita

<http://hukumpidanadantanegara.blogspot.com>, diakses tanggal 22 September 2017 pukul 16:45 Wita

siar justika.2016. “pengembalian kerugian negara”

,<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt56984acfc89f3/apakah-kasus->

korupsi-dihentikan-bila-terdakwa mengembalikan-kerugian-negara, diakses
pada tanggal 11 Maret 2018 pukul 02:08 Wita

detik.com.2012.” tiga lembaga penegak hukum koordinasi bagi tugas penanganan
tindak pidana korupsi”, [http://m.detik.com/news/berita/1864554/3-lembaga-](http://m.detik.com/news/berita/1864554/3-lembaga-penegak-hukum-koordinasi-bagi-tugas-penanganan-korupsi)
[penegak-hukum-koordinasi-bagi-tugas-penanganan-korupsi](http://m.detik.com/news/berita/1864554/3-lembaga-penegak-hukum-koordinasi-bagi-tugas-penanganan-korupsi), di akses pada tanggal
23 Maret 2018 pukul 03:49 Wita



RIWAYAT HIDUP



Abrar Lafi Naim panggilan Abrar atau Ba'ba, dilahirkan di kota Makassar pada hari senin, tanggal 24 Maret 1997, anak pertama dari lima bersaudara dari pasangan H. Muh Natsir Rahman, S.Sos, M.M dan Hj. St Nurhaena, S.Sos,. Peneliti sekarang bertempat tinggal di Jalan H. Pajonga Dg.Ngalle, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar. Peneliti menyelesaikan pendidikan dasar PAUD di TK. Ar-Rahman dan Lanjut Sekolah Dasar di SDN No.234

Inpres Takalar Kota dan lulus pada tahun 2008, pada tahun itu juga peneliti melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Takalar dan tamat pada tahun 2011 kemudian melanjutkan sekolah menengah atas di SMA Negeri 3 Takalar dan selesai pada tahun 2014, pada tahun yang sama yakni tahun 2014 peneliti melanjutkan jenjang pendidikan di perguruan tinggi negeri, tepatnya di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum, melalui jalur khusus SPAN-PTAIN dan selesai pada tahun 2018 dengan masa perkuliahan selama 3 tahun 8 bulan, peneliti lulus dengan predikat cumlaude dengan IPK 3,75 Selama menjadi mahasiswa peneliti juga aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler baik dalam intra kampus, maupun ekstra kampus, dalam kegiatan tersebut peneliti banyak aktifitas dalam berlembaga ekstra kampus di organisasi daerah kemahasiswaan yakni Himpunan Pelajar Mahasiswa Takalar, hingga menjadi pengurus inti di komisariat untuk universitas islam negeri alauddin makassar. Sebagai mahasiswa kita perlu sadar bahwasanya kita tidak musti hanya belajar dalam kelas semata-mata hanya untuk mengikuti bangku perkuliahan, yang didapatkan adalah hard-skill guna melangsungkan disiplin ilmu yang dipelajari dibangku perkuliahan secara mendalam, ada juga kegiatan ekstrakurikuler guna membangun soft-skill sebagai pelengkap dalam menggunakan hard-skill yang telah didapatkan. Dalam keingintahuan saya tak punya bakat khusus, tetapi saya cuma punya rasa penasaran yang menggebu-gebu. Motto “jika kamu benar menginginkan sesuatu ,kamu akan menemukan caranya. Namun jika tak serius, kau hanya akan menemukan alasan”

LAMPIRAN



**LEMBAR PENGESAHAN
DRAFT PROPOSAL**

**"Peran Lembaga Kejaksaan Dalam Proses Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan
Negeri Takalar (Tahun 2014-2016)"**

Disusun dan Diajukan Oleh :

ABRAR LAFI NAIM

NIM : 10400114095

Pada tanggal : 9 September 2017

Pembimbing I

Dr. Hamsiz S.H, M.Hum
NIP.19640601 199303 1 003

Pembimbing II

Dr. Hj. Fatimah, M.Ag
NIP.19661126 199403 2 001

Diketahui Oleh
Ketua Jurusan Ilmu Hukum

Istiqamah, SH., MH

NIP: 19680120 199503 2 001

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
NIP: 19621016 199003 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN ILMU HUKUM**

Kampus II Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Romangpolong-Gowa
Tlp. (0411) 841879, Fax. (0411) 8221400

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING DAN PENGUJI
JURUSAN: ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Nama : ABRAR LAFI NAIM
NIM : 10400114095
Konsentrasi : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI	HARI/ TANGGAL	MENYETUJUI DEKAN/KAJUR/SEKJUR
"PERAN LEMBAGA KEJAKSAAN DALAM PROSES PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI TAKALAR (TAHUN 2014-2016)"		Ketua Jurusan, Istiqamah, SH, M.H
PEMBIMBING		
1. Dr. Hamsir, S.H,M.Hum 2. Dr. Hj. Fatimah, M.ag		Sekretaris Jurusan, Rahman Syamsuddin, SH.,MH
PENGUJI		
3. 4.		Dekan, Prof. Dr. Darussalam, M. Ag

- Dibuatkan Surat Keputusan Pembimbing dan Penguji di Bagian Akademik Fakultas
- Jadwal ujian proposal/ hasil dijadwalkan Pengelola Jurusan

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di Bawah ini, Saya:

Nama : ABRAR LAFI NAIM

Nim : 10400114095

Jurusan : Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Menerangkan telah melaksanakan wawancara tentang PERAN LEMBAGA KEJAKSAAN DALAM PROSES PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI TAKALAR (TAHUN 2014-2016), dengan:

Nama : Zen Hadiano, S.H.,MH

Jabatan : KASI PIDSUS KEJARI TAKALAR

Demikian keterangan ini saya buat dengan sebenar-benarnya sebagai bukti telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai tugas akhir dan salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Takalar, 17 - November 2017

Narasumber



Zen Hadiano, S.H.,MH

Jaksa Muda Nip. 19790704 200501 1 005

Peneliti



ABRAR LAFI NAIM

NIM:10400114095




1 2 0 1 7 1 9 1 4 2 1 5 3 4 4

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 15179/S.01P/P2T/10/2017
 Lampiran : -
 Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
 Kepala Kejaksaan Negeri Kab. Takalar

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Syariah & Hukum UIN Alauddin Makassar Nomor : N-2473/SH.01/PP.00.9/10/2017 tanggal 12 Oktober 2017 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : **ABRAR LAFI NAIM**
 Nomor Pokok : 10400114095
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
 Alamat : Jl. Slt Alauddin No. 36 Samata Sungguminasa Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" PERAN LEMBAGA KEJAKSAAN DALAM PROSES PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI TAKALAR (TAHUN 2014-2015) "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **17 Oktober s/d 16 Desember 2017**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
 Pada tanggal : 17 Oktober 2017

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
 Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu


A. M. YAMIN, SE., MS.
 Pangkat : Pembina Utama Madya
 Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth
 1. Dekan Fak. Syariah & Hukum UIN Alauddin Makassar di Makassar;
 2. *Pertinggal.*

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zen Hadiano, S.H.,MH

Jabatan : KASI PIDSUS KEJARI TAKALAR

Alamat : Kabupaten Takalar

Menerangkan bahwa nama di bawah ini:

Nama : ABRAR LAFI NAIM

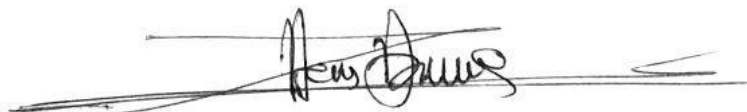
Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum,
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Alamat : Samata, Gowa

Telah melakukan wawancara pada tanggal Oktober 2017 bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Takalar guna melengkapi data penelitian skripsi yang berjudul “PERAN LEMBAGA KEJAKSAAN DALAM PROSES PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI TAKALAR (TAHUN 2014-2016)”

Demikian surat keterangan ini dibuat sebagaimana mestinya.

Takalar, 17 November 2017



Zen Hadiano, S.H.,MH

Jaksa Muda Nip. 19790704 200501 1 005

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI NARASUMBER

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bersedia menjadi Narasumber dalam penelitian yang dilakukan oleh saudara ABRAR LAFI NAIM yang berjudul PERAN LEMBAGA KEJAKSAAN DALAM PROSES PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI TAKALAR (TAHUN 2014-2016)

Saya memahami bahwa penelitian ini tidak akan berakibat negatif terhadap diri saya dan akan dijaga kerahasiaannya oleh peneliti serta hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Oleh karena itu saya bersedia menjadi Narasumber dalam penelitian ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Takalar, 17 - November - 2017

Tertanda

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Zen Hadiano, S.H.,MH

Jaksa Muda Nip. 19790704 200501 1 005

